

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN

**BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



***PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN PERDESAAN
MELALUI PENGUATAN PERAN KELOMPOK WANITA DAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO DI DESA RAGAWACANA KECAMATAN KRAMATMULYA
KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT***

Disusun Oleh :

- Ketua : Dr. H. Wasman, M.Ag**
(IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
- Anggota : Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si**
(IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
- Anggota : Wartoyo, MSI.**
(IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan pengabdian dengan judul Pemberdayaan Kaum Perempuan melalui Penguatan Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro di Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini, khususnya kepada pihak Dirjen DIKTIS Kementerian Agama RI sebagai donatur yang telah memberikan support kami baik secara moril maupun materiil.

Pengabdian yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian berfokus pada upaya pemberdayaan dan penguatan kaum perempuan di perdesaan yang selama ini identik dengan perempuan tertinggal dapat mengeluarkan potensi dan kreativitasnya melalui penguatan peran lembaga keuangan mikro dalam hal ini koperasi dan juga kelompok-kelompok wanita yang ada di desa Ragawacana. Oleh sebab itu dilaksanakanlah kegiatan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas SDM kaum perempuan yang diharapkan dapat berdampak pada kemajuan koperasi dan kelompok wanita sehingga dapat menghasilkan outcome berupa kesejahteraan keluarganya masing-masing.

Akhirnya tiada gading yang tak retak begitu pula penelitian ini tidak lepas dari kelemahan, oleh karena itu kritik serta saran sangat diharapkan dan penulis pun berharap semoga pengabdian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca semua dan masyarakat pada umumnya.

Cirebon, Desember 2015

Tim Pengabdian

Abstraksi

Besarnya potensi pada sektor pertanian belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat karena masyarakat terutama kaum laki-laki berkecenderungan lebih menyukai bekerja pada sektor lain misal jadi PNS, pegawai swasta, perdagangan dan merantau. Di sisi lain peran kaum perempuan dalam dalam mengoptimalkan potensi yang ada terasa minim dan belum diberdayakan. Bahkan kaum perempuan lebih dominan hanya pada peran domestiknya yaitu mengurus rumah tangga sehari-hari. Sehingga banyak kaum perempuan yang terjebak pada rutinitas harian yang tidak memiliki sumber pendapatan sendiri yang memiliki daya beli rendah sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan mereka semisal dengan melakukan penguatan kelompok wanita dan lembaga keuangan mikro. Usulan program pemberdayaan perempuan ini merupakan buah ketertarikan penulis terhadap aktifitas kelompok-kelompok perempuan yang berada di Desa Ragawacana Kabupaten Kuningan. Didasari oleh keberadaan perempuan yang berada pada posisi marginal di dalam masyarakat, terutama masyarakat perdesaan yang kuat dipengaruhi budaya patriarkhi, maka pemberdayaan kaum perempuan dengan penguatan kelompok-kelompok wanita di desa menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, dikaji dan dikembangkan serta didampingi.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*. Dengan demikian, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro. Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan, dengan materi: motivasi, *need of achievement*, kewirausahaan, menemukan peluang usaha, manajemen usaha, marketing, koperasi, lembaga keuangan mikro, manajemen keuangan, teknologi tepat guna, dan peningkatan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki seperti makanan, kerajinan tangan dan lainnya. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini antara lain : 1) Meningkatnya motivasi dan kreativitas berwirausaha masyarakat sasaran, 2), Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan KOPWAN di Desa Ragawacana, 3) Terbentuknya struktur dan manajemen koperasi desa Ragawacana, 4) Terbentuknya BUMDES desa Ragawacana, 5) Tersusunnya Laporan Keuangan Koperasi Desa Ragawacana. Sedangkan outcome yang diharapkan dapat tercipta dari program pengabdian ini adalah tercapainya kesejahteraan bagi kaum perempuan dan keuangannya dalam bidang ekonomi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Kegiatan.....	4
1.4. Manfaat Kegiatan.....	4
1.5. Kerangka Pemecahan Masalah.....	4
1.6. Sasaran.....	5
1.7. Keterkaitan.....	5
1.8. Metode Kegiatan.....	5
1.9. Rancangan Evaluasi.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Pemberdayaan.....	7
2.1.1.Prinsip Pemberdayaan.....	9
2.1.2.Arah Pemberdayaan Masyarakat.....	9
2.1.3.Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.....	9
2.1.4.Penguatan Kapasitas.....	10
2.1.5.Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	11
2.1.6.Tanggungjawab Stakeholders dalam Pemberdayaan....	11
2.2. Pemberdayaan Perempuan.....	12
2.2.1.Konsep Pemberdayaan.....	12
2.2.2.Strategi Pemberdayaan Perempuan.....	15
2.2.3.Pendekatan Efisiensi Terhadap WID.....	17
2.2.4.Pendekatan Pemberdayaan GAD.....	18
2.2.5.Implementasi Pemberdayaan Perempuan.....	19
2.3. Peran Lembaga Keuangan Mikro.....	20

BAB III	METODE PENGABDIAN	
3.1	Pengertian PAR.....	30
3.2	Langkah-Langkah Riset Aksi dalam Metodologi PAR.....	30
3.3	Prinsip-Prinsip PAR.....	32
2.4	Teknik Pendampingan dan Penelitian.....	35
BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Kondisi Objektif Lokasi Pengabdian.....	38
4.1.1.	Profil Desa.....	38
4.1.2.	Sejarah Desa.....	40
4.1.3.	Keadaan Sosial.....	43
4.1.4.	Keadaan Ekonomi.....	43
4.1.5.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	44
4.1.6.	Pembagian Wilayah Desa.....	45
4.1.7.	Struktur Organisasi.....	45
4.2	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.....	47
4.2.1.	Pelatihan Koperasi.....	47
4.2.2.	Seminar Motivasi Kewirausahaan.....	49
4.2.3.	Pelatihan Akuntansi Koperasi.....	50
4.2.4.	Pelatihan Marketing.....	51
4.2.5.	Pelatihan Manajemen dan Keuangan Desa.....	53
4.2.6.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna.....	55
4.3	Pendampingan.....	57
4.4	Hambatan Pendampingan.....	59
4.5	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan.....	61
4.6	Hasil Pendampingan.....	62
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67
DAFTAR TABEL		70
DAFTAR GAMBAR		72
LAMPIRAN		73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ragawacana merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Karamatmulya Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat tepatnya sebelah timur Gunung Ciremai. Sebagaimana umumnya kawasan yang berada di kaki gunung Desa Ragawacana termasuk kawasan yang memiliki potensi yang tinggi pada sektor pertanian dan sub sektor lainnya sejenis perikanan dan perkebunan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang, petani dan buruh tani.

Besarnya potensi pada sektor pertanian belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat karena masyarakat terutama kaum laki-laki berkecenderungan lebih menyukai bekerja pada sektor lain missal jadi PNS, pegawai swasta, perdagangan dan merantau. Di sisi lain peran kaum perempuan dalam dalam mengoptimalkan potensi yang ada terasa minim dan belum diberdayakan. Bahkan kaum perempuan lebih dominan hanya pada peran domestiknya yaitu mengurus rumah tangga sehari-hari. Sehingga banyak kaum perempuan yang terjebak pada rutinitas harian yang tidak memiliki sumber pendapatan sendiri yang memiliki daya beli rendah sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan mereka semisal dengan melakukan penguatan kelompok wanita dan lembaga keuangan mikro.

Usulan program pemberdayaan perempuan ini merupakan buah ketertarikan penulis terhadap aktifitas kelompok-kelompok perempuan yang berada di Desa Ragawacana Kabupaten Kuningan. Didasari oleh keberadaan perempuan yang berada pada posisi marginal di dalam masyarakat, terutama masyarakat perdesaan yang kuat dipengaruhi budaya patriarkhi, maka pemberdayaan kaum perempuan dengan penguatan kelompok-kelompok wanita di desa menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, dikaji dan dikembangkan serta didampingi.

Aktifitas kelompok yang berkuat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan kehidupan sehari-hari sampai persoalan ekonomi yang membelit rumah tangga merupakan kajian menarik yang membutuhkan bantuan penyelesaian. Kelompok-kelompok wanita tersebut telah ada di masyarakat cukup lama, hal ini mengindikasikan bahwa kelompok tersebut cukup eksis di masyarakat.

Di sisi lain problem pemberdayaan kaum perempuan adalah lemahnya akses permodalan di lembaga-lembaga keuangan semisal bank. Aktifitas mereka cukup terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan mikro sejenis koperasi atau LKM pengelola dana-dana bantuan pemerintah seperti PNPM, kompensasi BBM dan sejenisnya. Namun keberadaa LKM di perdesaan pun terasa belum maksimal dan optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal ini disebabkan oleh karena lemahnya kesadaran dalam pemanfaatan LKM, kesadaran masyarakat, dan manajemen yang lemah karena kompetensi pengelola yang tidak relevan. Berdasarkan pengamatan ternyata mayoritas pengelola LKM dan atau koperasi adalah kaum perempuan begitu pula mayoritas anggota dan penggunanya adalah kaum perempuan.

Berdasarkan analisis masalah di atas penulis berkesimpulan bahwa salah satu bentuk upaya untuk melakukan pemberdayaan kaum perempuan di perdesaan adalah dengan cara melakukan penguatan dan optimalisasi terhadap peran kelompok wanita dan lembaga keuangan mikro yang ada di perdesaan. Atas dasar pertimbangan inilah penyusun berketetapan hati untuk mengajukan usulan program pengabdian masyarakat dengan judul “Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan Melalui Penguatan Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro di Desa Ragawacana Kecamatan Keramat Mulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat”.

Todaro (1983) mengatakan pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional. Pada pelaksanaannya konsep pembangunan tersebut masih jauh dari kenyataan. Berbagai temuan empiric menunjukkan masih terjadi marginalisasi kehidupan masyarakat terutama kaum miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Dengan demikian, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).

Menurut Marguiret Robinson (2000) dalam Wiloejo (2005), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Jumlah kaum perempuan miskin di perdesaan cenderung meningkat
- b. Peluang usaha untuk kaum perempuan relatif terbatas

- c. Belum optimalnya usaha ekonomi produktif
- d. Belum optimalnya peran Kelompok Wanita
- e. Belum optimalnya peran lembaga keuangan mikro

2. Rumusan Masalah

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana memberdayakan kaum perempuan perdesaan di perdesaan melalui penguatan peran kelompok wanita usaha dan lembaga keuangan.

1.3. Tujuan Kegiatan

1. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi perempuan di perdesaan melalui pembentukan dan penguatan peran kelompok wanita usaha dan lembaga keuangan mikro.
2. Memberdayakan potensi kaum perempuan perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan usaha produktif yang bersinergi dengan kelompok wanita dan lembaga keuangan mikro

1.4. Manfaat Kegiatan

1. Membekali kaum perempuan perdesaan untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif
2. Memberi alternatif usaha kaum perempuan perdesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatkan peran Kelompok Wanita Usaha dan lembaga keuangan mikro di perdesaan agar dapat memberdayakan kaum perempuan perdesaan

1.5. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut:

- a. Memberi pemahaman mengenai kewirausahaan sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan motivasi berusaha dan kewirausahaan.

- b. Memberi pemahaman tentang pentingnya pembentukan dan pengelolaan kelompok usaha wanita. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan manajemen organisasi.
- c. Memberi pemahaman tentang pentingnya lembaga keuangan mikro (misal: koperasi wanita) bagi kaum perempuan. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan koperasi, manajemen koperasi dan manajemen keuangan.
- d. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Wanita usaha bersama yang didasarkan pada potensi kelompok dan didukung dengan peran yang optimal dari lembaga keuangan mikro. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan membuat business plan, pemasaran, dan penggunaan teknologi tepat guna.

1.6. Sasaran

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah masyarakat khususnya kaum perempuan yang berada di Desa Ragawacana Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 50 orang ditambah pengurus kelompok wanita dan pengelola lembaga keuangan mikro.

1.7. Keterkaitan

Kegiatan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dan berhasil dengan sukses tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak lain. Dalam hal ini pihak Desa Ragawacana Kecamatan Keramatmulya sebagai pihak yang mempunyai wilayah di mana kegiatan pengabdian masyarakat hendak dilakukan serta lembaga-lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan program pemberdayaan kaum perempuan di perdesaan.

1.8. Metode Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghubungi Kepala Desa Ragawacana untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang hendak diabdikan yaitu pemberdayaan kaum perempuan agar produktif secara ekonomi dan mencari data jumlah warga khususnya kaum perempuan yang tergolong miskin sebagai calon peserta yang akan dilibatkan dalam pemberdayaan.
2. Menghubungi pengurus Kelompok Wanita dan lembaga keuangan mikro untuk mendiskusikan problematika yang dihadapi dalam mengelola organisasi, manajemen

serta perannya dalam memberdayakan kaum perempuan serta mencari solusi yang akan ditawarkan.

3. Menyelenggarakan pelatihan, dengan materi:
 - a. Motivasi
 - b. Need of Achievement
 - c. Kewirausahaan
 - d. Menemukan peluang usaha
 - e. Manajemen Usaha
 - f. Marketing
 - g. Koperasi
 - h. Lembaga Keuangan Mikro
 - i. Manajemen Keuangan
 - j. Teknologi tepat guna
 - k. Peningkatan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki seperti makanan, kerajinan tangan dan lainnya.

1.9. Rancangan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah:

1. Minimal 80% peserta yang diundang hadir dalam pelatihan
2. Terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan
3. Minimal 50% peserta mampu mengembangkan usaha ekonomi dengan pendampingan dari Tim Pengabdian
4. Kelompok wanita usaha dan lembaga keuangan mikro tetap eksis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya anggota kelompok.

Pernyataan kepuasan dari peserta pelatihan dan pemerintah setempat.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Pemberdayaan

Secara paradigmatik munculnya konsep pemberdayaan bisa dilacak dari perlawanan ilmu-ilmu sosial humanistik terhadap positivisme yang sudah lama menjadi ideologi hegemonik dalam tradisi ilmu-ilmu sosial. Positivisme adalah sebuah aliran dalam tradisi keilmuan yang hendak membersihkan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praksis kehidupan manusia. Ia menganggap pengetahuan mengenai fakta obyektif sebagai pengetahuan yang sah. Ilmu, menurut positivisme, harus netral, bebas dari nilai, bebas dari kepentingan dan lain-lain (A. Giddens, 1975; V. Kraft, 1979).

Positivisme menjadi racun mujarab bagi ilmu-ilmu sosial dan para ilmuwan sosial. Mereka selalu mengganggu cara berpikir positivistik, dengan mengutamakan obyektivitas dalam berbagai kegiatan keilmuan. Dalam kegiatan penelitian misalnya, pengikut positivisme selalu menggunakan metode survei dan kuantitatif yang selalu menghasilkan kebenaran ilmiah yang obyektif. Subyektivitas sama sekali tidak dikenal dalam benak mereka, karena subyektivitas dianggap tidak ilmiah dan menyesatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep berpihak dan pemberdayaan maupun metode action research tidak dikenal dalam tradisi positivisme. Tetapi banyak penelitian survei yang lengkap dengan banyak rekomendasi ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sikap obyektif ilmuwan sosial yang berhaluan positivisme menjadikan mereka tidak “kritis” terhadap relasi-relasi sosial dalam masyarakat, sehingga mereka secara sistemik justru terlibat dalam proses penindasan atau ikut melanggengkan *status quo* yang represif.

Positivisme yang menghegemoni ilmu-ilmu sosial dan perguruan tinggi memang tidak luput dari kritik. Perspektif berhaluan kiri (Marxis), teori kritis Mazhab Frankfurt sampai postmodernisme telah lahir sebagai kritik atas positivisme yang sebenarnya menindas masyarakat. Teori kritis yang dikembangkan Jürgen Habermas (1971, 1974, 1979) dan para pendahulunya, sebagai contoh, sangat tidak percaya pada positivisme yang mengganggu ilmu pengetahuan bebas nilai dan kepentingan. Sebaliknya,

menurut teori kritik, setiap pengetahuan membawa kepentingan. Menurut teori kritik, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan ideologi merupakan tiga hal yang saling bertautan dan ketiganya terkait pada praksis kehidupan sosial manusia. Pengetahuan merupakan aktivitas, proses, kemampuan dan bentuk kesadaran manusiawi, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan bentuk pengetahuan yang direfleksikan secara metodis. Jika pengetahuan dan ilmu pengetahuan membeku (karena positivisme) menjadi delusi atau kesadaran palsu yang merintang praxis sosial untuk mewujudkan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan dan kebebasannya, maka keduanya telah berubah menjadi ideologi. Teori kritik sangat berkepentingan membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan ideologi (positivisme) itu melalui kritik ideologi. Kepentingan teori kritik disandarkan pada prinsip bahwa manusia sebagai spesies punya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan ideologis melalui perantara kekuasaan, dan kepentingan ini tampil dalam bentuk pengetahuan analitis yang disistematisir secara metodis menjadi ilmu-ilmu sosial kritis-humanistik.

Konsep pemberdayaan sebenarnya sangat diilhami, atau paling tidak, bisa dilacak dengan teori kritis di atas. Pemberdayaan sebagai bentuk keberpihakan ilmu sosial dan ilmuwan sosial sangat diilhami oleh kepentingan emansipatoris, tindakan revolusioner dan metodologi refleksi-diri yang dikembangkan oleh teori kritik. Kita tidak bakal memperoleh pemahaman tentang pemberdayaan bila masih menggunakan kaca mata positivisme, karena aliran ini hanya mempunyai kepentingan teknis, tindakan rasional dengan dukungan metodologi empiris-analitis, serta mengecam habis-habisan keberpihakan. Ketika pemberdayaan menjadi wacana, kerangka kerja dan metodologi teori kritik tersebut sering digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi sosial, misalnya melalui *action research* dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR antara lain menganjurkan penelitian bersama antara peneliti dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah lokal, menguraikan, menganalisis dan sekaligus memecahkan masalah bersama-sama. Dengan demikian, PAR yang berbasis pada teori kritik itu mengutamakan pendekatan intersubyektivitas, sebagai proses bersama untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut teori kritik ini adalah sebuah upaya refleksi-diri dan emansipatoris untuk mewujudkan kesadaran

kritis yang bisa dicapai dengan “pendidikan pembebasan” seperti dibayangkan Paulo Freire.

2.1.1. Prinsip Pemberdayaan

- a. Prinsip pendekatan kelompok masyarakat
- b. Prinsip keserasian
- c. Prinsip kepemimpinan dari mereka sendiri
- d. Prinsip pendekatan kemitraan
- e. Prinsip swadaya
- f. Prinsip belajar sambil bekerja
- g. Prinsip pendekatan keluarga

2.1.2. Arah Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah :

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan partisipasi masyarakat kelas bawah.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peranserta masyarakat, dalam arti semakin memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambil keputusan pembangunan.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat dalam arti semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1.3. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

- a. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara

sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

- b. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.

2.1.4. Penguatan Kapasitas

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik.

2. Pengembangan kemampuan dalam permodalan

Kegiatan pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan masyarakat mampu menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta berusaha dalam sistem pasar. Penguatan modal usaha dapat diberikan dalam bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman tergantung kemampuan kelompok. Dana ini dikelola secara langsung oleh kelompok untuk dipergunakan secara bersama.

3. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat

Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan kepada petani di bidang ekonomi secara berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya, dan mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian. Di samping itu pembinaan diarahkan agar kelompok mampu mengelola usaha bersama melalui kursus-

kursus dan pelatihan teknis, sehingga mampu mengembangkan usahanya melalui kegiatan temu usaha, pameran dalam rangka memasarkan hasil usahanya.

2.1.5. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
- b. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*).
- c. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna,
- d. Mendekatkan masyarakat dengan pasar,
- e. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

2.1.6. Tanggung Jawab Stakeholders dalam Pemberdayaan

1. Keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah *resultante* dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan setiap instansi, sehingga menuntut adanya sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini harus diwujudkan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial budaya.
2. Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada pada pundak pemerintah daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi mereka. Dengan desentralisasi kegiatan pembangunan, selangkahnya pemerintah daerah lebih banyak memberikan prioritas pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat.
3. Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat bukan hanya pada tangan pemerintah tetapi juga pihak-pihak *non* pemerintah yaitu, masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik Negara dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Tanggung jawab membangun masyarakat pada hakekatnya merupakan tanggung jawab utama masyarakat itu sendiri. Supaya pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat maka pemerintah hanya mempersiapkan dan

memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna pemberdayaan, yaitu mengembangkan apa yang telah ada pada masyarakat menjadu lebih besar skalanya, lebih ekonomis dan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2.2. Pemberdayaan Perempuan

2.2.1. Konsep Pemberdayaan

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55),

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama- sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Riant Nugroho (2008: 164), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah :

- a. meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini,
- b. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan,
- c. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri,
- d. meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha home industry. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya

pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) lima langkah tersebut yaitu :

1. membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan,
2. membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk,
3. memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha,
4. mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal,
5. membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho (2008:165-166) adalah :

1. penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol,
2. peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat,
3. pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan,
5. peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam home industry, hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif. Penciptaan iklim yang kondusif tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki,
- b. menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya,
- c. tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat (Roosganda Elizabeth, 2007:131).

2.2.2. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pada dasawarsa “70-an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah “Perempuan dalam Pembangunan”.

Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan (Women in Development/WID) karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga yang posisinya yang termarginalisasi perlu diikutsertakan ke dalam pembangunan. Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi kalangan liberal dari Barat sangat terasa pengaruhnya dengan pendekatan WID ini. Pada saat itu proyek-proyek yang ada berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan khususnya perempuan dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. “Proyek yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perempuan ini contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, menyulam dan lain sebagainya” (Riant Nugroho, 2008: 137-138).

Dalam realisasinya konsep WID gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek pembangunan, maka dari itu konsep Gender and Development (GAD) sebagai follow-up nya (2008: 140). Dalam konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah perempuan semata. Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai “pemberdayaan”. Menurut Julia Cleves “Pemberdayaan ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas (bottom-up) dari pada pemberdayaan dari atas ke bawah (top-down)” (Julia Cleves Moss, 1996: 209-210).

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan.

Tabel 1. *Women in Development (WID) & Gender and Development (GAD).*

	WID	GAD
Pendekatan	• Berusaha mengintegrasikan	• Berusaha memberdayakan dan mentransformasi
Fokus	• Perempuan	• Hubungan antara pria dan
Permasalahan	• Pengesampingan perempuan dari proses	• Hubungan kekuatan tak setara yang menghalangi pembangunan yang layak dan
Sasaran	• Pembangunan yang lebih efisien dan efektif.	• Pembangunan yang layak dan berkelanjutan. • Pria dan wanita berbagi dalam pengambilan

Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan proyek-proyek perempuan, unsur-unsur perempuan, dan proyek-proyek terpadu. • Meningkatkan produktivitas dan penghasilan perempuan. • Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan memperuntukkan kebutuhan jangka pendek yang ditentukan oleh pria dan wanita untuk meningkatkan kondisi mereka. • Mengidentifikasi dan memperuntukkan kepentingan pria dan wanita untuk jangka panjang.
----------	--	--

Sumber : Riant Nugroho (2007: 179)

2.2.3. Pendekatan Efisiensi terhadap Women in Development (WID)

Pendekatan efisiensi terhadap perempuan dalam pembangunan dinyatakan berdasarkan kebijakan Overseas Development Administration (ODA) yang tercatat tahun 2009 dan berbunyi :

“...Perempuan memegang kunci bagi masyarakat yang lebih produktif dan dinamis. Jika mereka sendiri sehat dan berpengetahuan, serta memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, keterampilan dan kredit, mereka akan lebih produktif secara ekonomis...” (Julia Cleves Moss, diterjemahkan oleh Hatian Silawati, 1996: 206).

Pendekatan efisiensi berkerja pada dua tingkat yang berbeda. Untuk memastikan efisiensi dalam proyek pembangunan menuntut keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efisien dan setia dibanding laki-laki. Aspek kedua adalah kebijakan pembangunan pada tingkat makro menuntut efisiensi dan produktivitas dalam program penyesuaian struktural (1996: 207).

2.2.4. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender and Development (GAD)

Pendekatan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan adalah dalam hal kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam pendekatan pemberdayaan berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan, yang mengarah pada mobilitas politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (1996: 210).

Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan maka ada 4 (empat) langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment);
- b. Kesetaraan Gender (Gender Equality);
- c. Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (Affirmative Action);
- d. Harmonisasi atau Sinkronisasi Peraturan/Perundang-undangan dan Kebijakan (Synchronization of Regulations and Policies). (Program Pemberdayaan Perempuan Biak Tahun 2006-2007).

Adapun menurut Delly Maulana (2009: 46) menyebutkan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan produktivitas perempuan yaitu :

- a. pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan atau kelompok,
- b. program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok,
- c. pengembangan kelembagaan keuangan mikro di tingkat lokal,
- d. penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif,
- e. pengembangan usaha yang berkesinambungan,
- f. pelibatan keluarga atau suami kelompok sasaran,
- g. keterpaduan peran serta seluruh stakeholders,
- h. penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha,
- i. fasilitas bantuan, permodalan bersifat bergulir untuk pemupukan permodalan,
- j. pemantapan serta pendampingan untuk kemandirian kelompok.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan diperlukan keberpihakan dari pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan teori

Gender and Development, dimana teori ini tidak hanya menfokuskan pada perempuan tetapi juga fokus terhadap keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

2.2.5. Implementasi Pemberdayaan Perempuan

Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model Gender and Development. Dalam pendekatan ini bertujuan memahami pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dari diri perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan pada perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat. Sebagai contoh adalah kegiatan pemberdayaan perempuan di Ahmedabad, Gujarat, India. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Self-Employed Women's Association (SEWA). Sebelum adanya pemberdayaan, perempuan di Ahmedabad berkerja sebagai pemulung kertas. Hasil yang diperoleh dari memulung hanya 10 persen dari nilai kertas yang dikumpulkan. Melalui asosiasi SEWA, perempuan di Ahmedabad diberikan bantuan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan pelatihan serta mendirikan bank sendiri untuk komunitas mereka. Namun dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan, perempuan masih dihadapkan pada banyaknya korupsi dan kendala, ketika orang dengan kepentingan pribadi menghentikan jalan mereka.

Menghadapi bermacam-macam tekanan ini, pemulung kertas mengorganisasikan diri dalam serangkaian kerja sama. Dengan memanfaatkan kekuatan dan posisi kolektif, mereka menggunakan solusi imajinatif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pada bersandar pada niat baik agar mereka mendapat akses terhadap kertas. Mereka justru meneliti sistem tender dan belajar bagaimana bersaing dengan para kontraktor dengan kondisinya sendiri dan mereka berjuang agar terbebas sepeh dari perantara serta berharap agar mempunyai pabrik sendiri untuk memproses kembali kertas mereka. Adanya kekuatan mereka yang terpadu dan tak kenal nyerah, para pemulung tersebut menjadi diri mereka sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dimata pemerintah, kontraktor dan diri mereka sendiri.

Pada saat yang sama, SEWA bekerja dengan pemulung kertas guna menemukan cara-cara alternatif peningkatan pendapatan. Dari adanya usaha pemberdayaan tersebut, perempuan di Ahmedabad saat ini telah mampu hidup lebih baik. Mereka telah mampu memperoleh harga yang lebih baik untuk kertasnya serta mampu mendirikan koperasi. “Empat koperasi

baru para mantan pemulung kertas terbentuk : penenunan, kebersihan, kabel elektronik dan produksi file” (Julia Cleves Mosse. 2007: 211-213).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemberdayaan cukup penting untuk meningkatkan kemandirian perempuan khususnya di bidang ekonomi. Peran adanya lembaga atau organisasi serta keberpihakan dari laki-laki mampu membuat perempuan meningkatkan kualitas hidupnya yang pada akhirnya dapat berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi keluarga.

2.3. Peran Lembaga Keuangan Mikro

Todaro (1983) mengatakan pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional. Pada pelaksanaannya konsep pembangunan tersebut masih jauh dari kenyataan. Berbagai temuan empiric menunjukkan masih terjadi marginalisasi kehidupan masyarakat terutama kaum miskin baik diperkotaan maupun perdesaan.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *microcredit*.

Dengan demikian, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan

menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (KrisnaWijaya:2005).

Menurut Marguiret Robinson (2000) dalam Wiloejo (2005), pinjaman dalam bentuk *microcredit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

Keberadaan LKM menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Menurut Krishnamurti (2003) sebagaimana dikutip oleh Ashari (2006: 153) menyebutkan peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui:

1. Tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befluktuasi
2. Mengelola risiko dengan lebih baik
3. Secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset
4. Mengembangkan kegiatan usaha mikronya
5. Memperkuat kapasitas perolehan pendapatannya
6. Dapat merasakan tingkathidup yang lebih baik.

Tanpa akses yang cukup pada LKM, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak atau pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ashari (2006: 152) menyatakan bahwa “Potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar.” Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut, yaitu:

1. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa.
2. Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
3. Karakteristik umumnya membutuhkan platform kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM.
4. Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah.
5. Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal- emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Kontribusi Usaha mikro dan kecil dalam perkembangan perekonomian secara nasional maupun lokal sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah usaha mikro dan kecil yang mendominasi struktur perekonomian secara nasional maupun lokal. Hasil sensus ekonomi BPS tahun 2006 tercatat bahwa dari total sebanyak 22.513.552 perusahaan/usaha, 99 persen masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK). Data Kementrian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa PDB UKM tahun 2014 mencapai Rp 2.609 triliun, di mana sebesar Rp

1.505 triliun di antaranya disumbangkan oleh unit-unit usaha mikro. PDB UKM ini lebih besar dibanding PDB yang dihasilkan unit-unit usaha besar secara kumulatif yang mencapai Rp 2.087 triliun. Pada tingkat lokal dominasi UMK semakin dominan, apalagi di tingkat pedesaan. Pemberdayaan ekonomi pedesaan tidak terlepas dari pemberdayaan UMK yang berada di pedesaan tersebut.

Tidak bisa dibantahkan bahwa UMKM merupakan pilar perekonomian nasional dan lokal. Daya tahan UMKM terhadap krisis juga telah terbukti cukup tangguh. Meskipun demikian upaya-upaya pengembangan UMKM masih menjadi kendala. Ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh UMKM: masalah permodalan, pemasaran dan bahan baku (Ismawan, 2003).

Beberapa penyebab sulitnya UMKM memperoleh tambahan modal kerja maupun investasi dikarenakan:

- 1) UMKM masih belum memiliki laporan keuangan yang tersusun baik beserta kelengkapan administrasi pendukungnya (bukti-bukti transaksi keuangan).
- 2) Kebanyakan di antara UMKM masih belum bisa menyusun business plan yang baik sebagai salah satu syarat ketentuan pengajuan proposal pembiayaan kredit usaha,
- 3) Beberapa UMKM khususnya pemilik usaha mikro dan kecil, banyak yang tidak memiliki agunan sebagai salah satu syarat jaminan pengucuran kredit oleh lembaga keuangan.

Di sisi lain, lembaga keuangan mempunyai kendala juga di dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Kendala penyaluran kredit lembaga keuangan terhadap UMKM terlihat dari masih rendahnya nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Ada banyak perdebatan mengenai penyebab rendahnya LDR. Perdebatan yang mengemuka di antaranya saling menimpakan penyebab tersebut pada pihak lain. Pihak UMKM menyatakan bahwa pihak perbankan memberikan persyaratan pengajuan kredit yang terlalu menyulitkan UMKM. Salah satu syarat pengajuan kredit yang paling dirasakan sulit dipenuhi oleh UMKM khususnya mikro dan kecil adalah agunan. Sementara di sisi lain, pihak perbankan menyatakan bahwa mereka telah membuka peluang seluas-luasnya bagi UMKM untuk mengajukan penambahan modal usaha. Pihak perbankan menyatakan juga bahwa rendahnya LDR disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit dari pengusaha itu sendiri.

Perdebatan mengenai pihak mana yang sebenarnya mengakibatkan rendahnya realisasi penyaluran dana UMKM tidak terlalu penting untuk dikemukakan. Alangkah baiknya apabila masing-masing pihak justru saling bekerjasama. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai kepentingan dalam mengoptimalkan penyaluran dana UMKM. Pihak UMKM berkepentingan untuk meningkatkan modal usahanya. Pihak perbankan berkepentingan untuk menyalurkan dana tersebut. Saat ini yang dibutuhkan adalah adanya kerjasama antara berbagai pihak untuk berkomitmen mengembangkan UMKM melalui kompetensi yang dimilikinya masing-masing.

Sedikitnya ada tiga pihak (tiga pilar) yang diharapkan dapat bekerjasama dengan baik untuk bersama-sama mengembangkan UMKM. Ketiga pilar tersebut adalah lembaga keuangan, lembaga pendamping bisnis dan pemerintah. Masing-masing pihak mempunyai peran utama masing-masing.

Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak yang sebenarnya juga berkepentingan dalam kegiatan usahanya mempunyai peran membantu UMKM dari sisi penambahan modal usaha, baik modal kerja maupun investasi. Lembaga keuangan yang dimaksud di sini adalah bank dan non bank. Lembaga keuangan dapat memberikan pelatihan bagi UMKM dalam menyusun proposal pengembangan usaha yang feasible. Sosialisasi kepada UMKM harus terus dilakukan oleh lembaga keuangan terkait dengan prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya.

Pilar kedua dalam pengembangan UMKM adalah lembaga pendamping bisnis (Business Development Services Provider). Lembaga pendamping bisnis ini berperan utama dalam membantu UMKM meningkatkan kesehatan dan kinerja usahanya. Peran lain dari lembaga pendamping bisnis adalah:

- 1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) UMKM.
- 2) membantu UMKM menyusun administrasi keuangan yang tertata dengan baik.
- 3) membantu UMKM menyusun business plan,
- 4) mendampingi UMKM dalam mengajukan proposal pengembangan usaha kepada lembaga keuangan,

Ada banyak pihak yang dapat dimasukkan dalam pilar kedua ini, antara lain: lembaga swadaya masyarakat (LSM), pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi. Program sarjana masuk desa akan menjadi bagian cukup penting dalam meningkatkan kapasitas UMK di pedesaan.

Pilar ketiga adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Peran penting lainnya adalah menciptakan berbagai kebijakan melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya. Pemerintah daerah juga dapat membantu pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan ekonomi yang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM di daerahnya.

Pemerintah pusat dan daerah dapat membantu UMKM melakukan promosi hasil usahanya dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain menjalin kerjasama yang kuat antar lembaga yang terkait dengan pengembangan UMKM, juga dituntut adanya perubahan paradigma setidaknya cara pandang dalam memahami permasalahan UMKM. UMKM memiliki karakteristik usaha yang bermacam-macam. Oleh karenanya diperlukan skema pembiayaan yang bermacam-macam pula sesuai dengan karakter usaha yang mereka tekuni. Sebagai contoh, karakter usaha kerajinan berbeda dengan trading, pertanian, peternakan, industri pengolahan dan jenis usaha lainnya. Masing-masing jenis usaha membutuhkan skema pembiayaan yang mestinya tidak seragam.

Kalangan lembaga keuangan dituntut untuk lebih kreatif mengembangkan berbagai model pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh UMKM. Perbankan dituntut berpikir kreatif dengan keterbatasan aturan yang membelitnya untuk memproduksi berbagai skim pembiayaan yang kapabel bagi UMKM. Bukan sebaliknya, UMKM dituntut untuk memenuhi syarat-syarat bank teknis yang kadang sulit dijangkau oleh sebagian besar UMKM. Perbankan yang memiliki basis pendidikan lebih baik dibandingkan pelaku UMKM, semestinya melakukan penyesuaian terhadap berbagai aturan yang mereka buat. Selanjutnya, berbagai macam skim pembiayaan tersebut harus disosialisasikan kepada para UMKM melalui berbagai macam media. Melalui kegiatan ini diharapkan asymmetric information yang terjadi selama ini dapat dikurangi hingga batas minimal. Wajah perbankan kita diharapkan dapat berubah lebih ramah bagi UMKM.

Harus disadari bahwa tidak berhasilnya target pengucuran kredit ke UMKM selama ini lebih dikarenakan masih sulitnya UMKM memenuhi persyaratan bank teknis (UMKM dianggap belum bankable). Anggapan ini harus dirubah menjadi sebenarnya perbankanlah yang belum UMKMable. Perubahan sudut pandang ini mensyaratkan bahwa selain

UMKMnya dituntut untuk berubah lebih tertib dan baik, perbankan juga harus melakukan perubahan. Tuntutan agar UMKM menjadi bankable seharusnya bukan sebagai jurang yang terjat bagi UMKM yang benar-benar memerlukan uluran tangan perbankan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sebaliknya, perbankan juga dituntut untuk berempati dan jeli dalam menangkap peluang bisnis yang dikelola oleh para UMKM.

Melalui kerjasama tripilar dan perubahan sudut pandang di atas, diharapkan *asymmetric information* antara perbankan dengan UMKM selama ini akan semakin berkurang. Hubungan antara perbankan dengan UMKM menjadi lebih mesra sehingga akan menguntungkan keduanya pada khususnya dan perekonomian bangsa pada umumnya. Tanpa adanya kemauan untuk saling memahami dan mendekatkan diri, maka jarak antara perbankan dan UMKM akan tetap terus lebar. Akhirnya, hanya sedikit UMKM yang dapat mengakses pembiayaan usaha ke bank.

Peran LKM dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMK di Pedesaan Usaha Mikro dan Kecil menjadi basis perekonomian pedesaan. Karakteristik UMK di pedesaan sebagian besar dicirikan dengan kegiatan usaha di sektor pertanian. Pengelolaan kegiatan ekonomi pedesaan secara umum dan produksi pertanian secara khusus, dihadapkan pada kenyataan bahwa proses transformasi dari input menjadi output (proses produksi) berlangsung dalam jangka waktu lama. Hasil produksi dan penjualan tidak menentu, terjadi volatilitas pasar komoditas pertanian. Kemampuan pengelolaan usaha pertanian dan rumah tangga pedesaan masih terbatas, belum banyak inovasi. Pelaku UMK masih terus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan input dan pemasaran.

Ketika UMK di pedesaan ingin mengembangkan usahanya, permasalahan pembiayaan atau permodalan selalu muncul. Keterbatasan layanan pembiayaan/permodalan menyebabkan rumah tangga pedesaan terjebak pada layanan jasa pinjaman dengan bunga tinggi. Perbankan komersial sulit membiayai UMK karena masalah persyaratan bank teknis, seperti: catatan administrasi keuangan, laporan keuangan dan jaminan. Keberadaan LKM sangat dibutuhkan karena memberikan fleksibilitas persyaratan dan pembayaran yang lebih baik dibandingkan bank komersial.

Lembaga Keuangan Mikro berperan membantu pelayanan jasa keuangan pada masyarakat pedesaan. Ketersediaan layanan pembiayaan di pedesaan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan usahanya.

Lembaga Keuangan Mikro sedikitnya memiliki tiga peran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan: 1) sebagai lembaga perantara keuangan di pedesaan, 2) sebagai lembaga perantara sosial di pedesaan, dan 3) sebagai agen pembangunan ekonomi pedesaan. Sebagai lembaga perantara keuangan, LKM memperbesar akses pelayanan jasa keuangan pada masyarakat desa. Masyarakat bisa memanfaatkan jasa LKM untuk menyimpan uangnya dan mengajukan pembiayaan untuk peningkatan usahanya. Sebagai lembaga perantara sosial, LKM melakukan pembinaan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Lembaga Keuangan Mikro melakukan pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat. Sebagai agen pembangunan ekonomi pedesaan, LKM berperan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pedesaan berputar di wilayah tersebut. Berbeda dengan bank komersial, penghimpunan dan penyaluran dana bisa banyak berbeda. Bank komersial menghimpun dana masyarakat pedesaan untuk disalurkan ke masyarakat perkotaan. Lembaga Keuangan Mikro juga berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi dan menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Membangun Lembaga Keuangan Mikro yang Sehat dan Kuat Lembaga Keuangan Mikro dibutuhkan oleh UMK untuk pengembangan usaha. Namun demikian, LKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu: masalah kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM). Saat ini yang dikenal luas dan diakui secara umum oleh lembaga-lembaga bisnis adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dan bank. Bertransaksi dengan kedua lembaga keuangan tersebut dianggap relatif aman daripada bertransaksi dengan lembaga keuangan yang badan hukumnya belum jelas.

Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 menyisakan permasalahan terkait status badan hukum lembaga-lembaga keuangan mikro yang belum memenuhi persyaratan permodalan untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Banyak LKM yang menghadapi ketidakjelasan status badan hukum ini. Mereka dihadapkan pada tiga pilihan: 1) berbadan hukum bank, 2) berbadan hukum koperasi, atau 3) tidak memiliki badan hukum. Apabila pilihannya adalah berbadan hukum bank, diperlukan modal yang cukup besar untuk mendirikan BPR. Tidak semua LKM yang ada cukup mampu

memenuhi persyaratan pendirian BPR ini. Jika pilihannya adalah mendirikan koperasi, persyaratan administratif yang sulit terpenuhi. Koperasi adalah kumpulan orang dan modal. Tidak jarang LKM yang mengajukan pendirian koperasi melakukan rekayasa terhadap persyaratan administratif khususnya pada para pendiri koperasi dan anggota koperasi. Banyak ditemukan anggota koperasi non aktif sepanjang umur. Koperasi yang didirikan oleh komunitas yang beragam menghadapi kendala komunikasi dan kepatuhan terhadap peraturan organisasi.

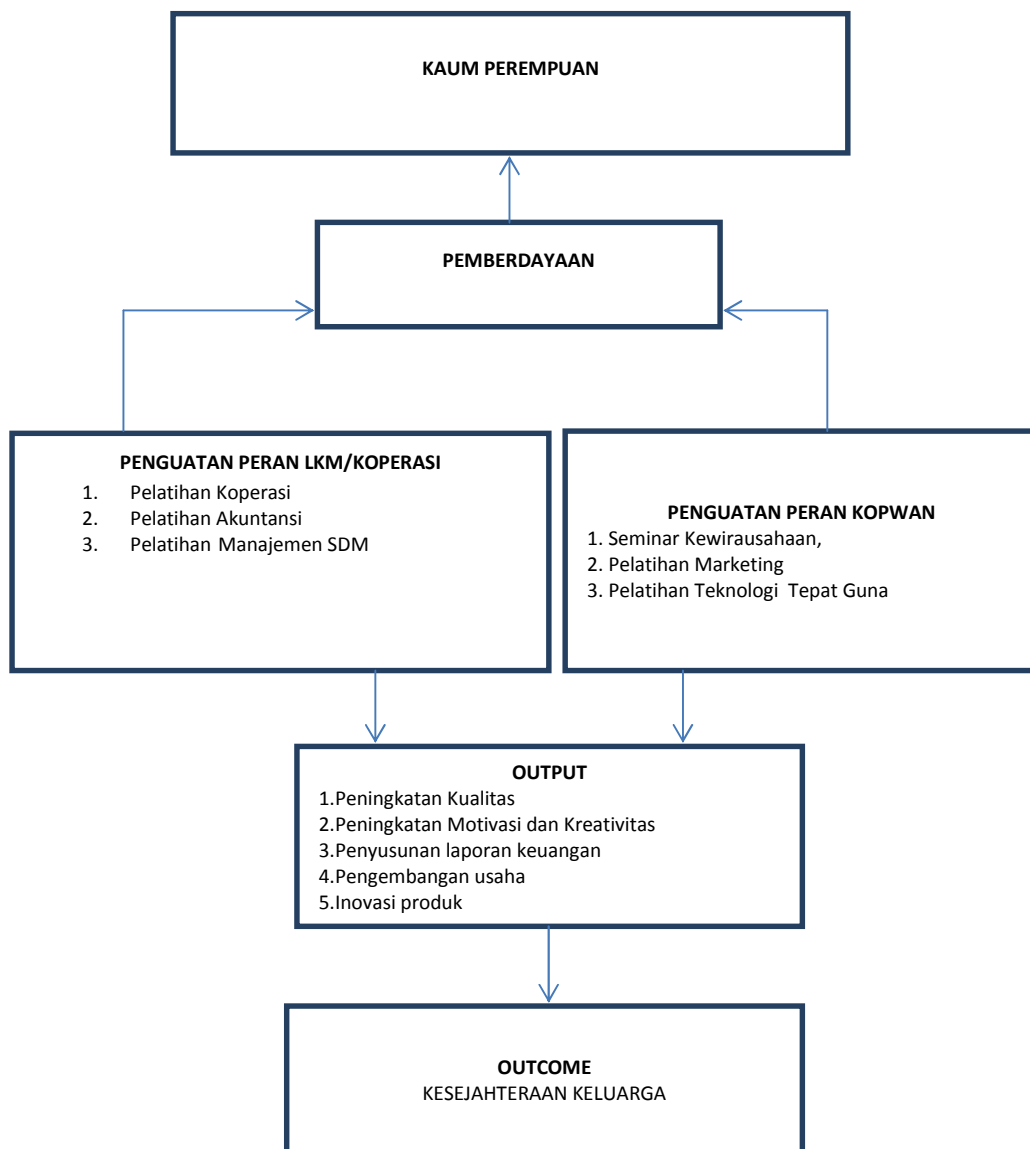
Mengingat kendala-kendala di atas, masih banyak LKM yang terus beroperasi tanpa status badan hukum yang jelas. Keberadaan LKM ini di satu sisi membawa banyak manfaat untuk pengembangan UMK, tapi di sisi lain tidak diakui oleh entitas bisnis formal. Badan Usaha Milik Desa menjadi alternatif solusi memecahkan kebuntuan ketidakjelasan status badan hukum LKM. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum.

BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Ada beberapa peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, antara lain: (i) peningkatan kualitas SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDES telah mampu memperkuat kelembagaan ekonomi dan keuangan di pedesaan. Namun BUMDES masih menyisakan permasalahan terkait pengakuan oleh entitas bisnis formal lainnya. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan, BUMDES masih belum mendapatkan kepercayaan dari entitas bisnis formal. Bertransaksi dengan BUMDES dianggap masih belum aman. Entitas bisnis formal masih merasa lebih aman bertransaksi dengan koperasi dan perbankan yang sudah jelas-jelas kuat badan hukumnya. Masih banyak yang belum mengenal keberadaan BUMDES ini. Sosialisasi mengenai BUMDES ini harus terus dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dan lembaga bisnis.

Permasalahan kedua untuk membangun LKM yang sehat dan kuat adalah aspek SDM. Kualitas SDM yang baik merupakan kunci dari suksesnya bisnis LKM. Banyak LKM yang tidak berkembang atau setelah berkembang besar kemudian ambruk karena masalah SDM ini. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan, kepercayaan tumbuh karena sebuah bisnis dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Peningkatan kualitas SDM sebuah LKM menjadi kunci dari suksesnya bisnis LKM. Melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan secara terus menerus pada pengelola LKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM.

Gambar 2.1. Logical Framwork Program Pengabdian



BAB III METODE PENGABDIAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Ragawacana dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*).

3.1. Pengertian PAR

PAR adalah singkatan dari Participatory Action Research, yaitu merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam PAR perlu melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain-lain yang terkait.

3.2. Langkah-langkah Riset Aksi Dalam Metodologi PAR

1. Pemetaan Awal (*Preleminary mapping*)

Pemetaan awal merupakan pemetaan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui situasi dan keadaan sosial yang ada di masyarakat. Pemetaan ini dilakukan bersama dengan masyarakat. Dengan pemetaan ini peneliti dapat mengetahui letak geografis Dusun Sempol dan batas-batas Dusun Sempol. Selain itu jumlah penduduk, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan perekonomian masyarakat dapat di dapat dari kegiatan pemetaan awal.

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Dalam melakukan penelitian pendampingan ini peneliti juga perlu membangun hubungan kemanusiaan dengan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peneliti. Dalam membangun hubungan kemanusiaan ini peneliti berbaur dengan masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat, yaitu tahlilan, sholat berjama'ah dll.

Langkah-langkah ini dilakukan supaya peneliti bisa menyatu menjadi simbiosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya bersama-sama (*partisipatif*).

3. Penentuan Agenda Riset Untuk Perubahan Sosial

Penentuan agenda riset dalam penulisan ini di perlukan oleh peneliti. Bersama komunitas, peneliti mengagendakan program riset melalui teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. Sambil merintis membangun kelompok-kelompok komunitas, sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada.

4. Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*)

Bersama Komunitas melakukan pemetaan wilayah, maupun persoalan yang dialami masyarakat. Pemetaan lebih difokuskan pada pemberdayaan kaum wanita di Desa Ragawacana.

5. Menyusun Strategi Gerakan

Komunitas menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang telah dirumuskan. Menentukan langkah sistematis, menentukan pihak yang terlibat (*stakeholders*), dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakannya serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program.

6. Pengorganisasian Masyarakat

Komunitas didampingi peneliti membangun pranata-pranata sosial. Baik dalam bentuk kelompok-kelompok kerja, maupun lembaga-lembaga masyarakat yang secara nyata bergerak memecahkan problem sosialnya secara simultan. Demikian pula membentuk jaringan-jaringan antar kelompok kerja dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan program aksi yang direncanakan.

7. Melancarkan Aksi Perubahan

Aksi memecahkan problem dilakukan secara simultan dan partisipatif. Program pemecahan persoalan kemanusiaan bukan sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat, sehingga terbangun pranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan *community organizer* (pengorganisir dari masyarakat sendiri) dan akhirnya akan muncul *local leader* (pemimpin lokal) yang menjadi pelaku dan pemimpin perubahan.

8. Refleksi (Teoritisasi Perubahan Sosial)

Peneliti bersama komunitas merumuskan teoritisasi perubahan sosial berdasarkan atas hasil riset, proses pembelajaran masyarakat, dan program-program aksi yang

telah terlaksana, peneliti dan komunitas merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya (dari awal sampai akhir). Refleksi teoritis dirumuskan secara bersama, sehingga menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khalayak publik sebagai pertanggung jawaban akademik.

9. Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan

Keberhasilan program PAR tidak hanya diukur dari hasil kegiatan selama proses, tetapi juga diukur dari tingkat keberlanjutan program (*sustainability*) yang sudah berjalan dan munculnya pengorganisir-pengorganisir serta pemimpin lokal yang melanjutkan program untuk melakukan aksi perubahan. Oleh sebab itu, bersama komunitas peneliti memperluas skala gerakan dan kegiatan. Mereka membangun kelompok komunitas baru di wilayah-wilayah baru yang dimotori oleh kelompok dan pengorganisir yang sudah ada. Bahkan diharapkan komunitas-komunitas baru itu dibangun oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus difasilitasi oleh peneliti. Dengan demikian masyarakat akan bisa belajar sendiri, melakukan riset dan memecahkan problem sosialnya secara mandiri.

3.3. Prinsip-Prinsip PAR

Terdapat 16 prinsip kerja PAR yang menjadi karakter utama dalam implementasi kerja PAR bersama komunitas. Adapun 16 prinsip kerja tersebut adalah terurai sebagai berikut:

1. Sebuah pendekatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial dan praktek-prakteknya dengan cara merubahnya dan melakukan refleksi dari akibat-akibat perubahan itu untuk melakukan aksi lebih lanjut secara berkesinambungan.
2. Secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (autentik) membentuk sebuah siklus (lingkaran) yang berkesinambungan dimulai dari: analisa sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi (teoritisasi pengalaman) dan kemudian analisa social, kembali begitu seterusnya mengikuti proses siklus lagi. Proses dapat dimulai dengan cara yang berbeda.
3. Kerjasama untuk melakukan perubahan: melibatkan semua pihak yang memiliki tanggungjawab (stakeholders) atas perubahan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan secara terus menerus memperluas dan memperbanyak kelompok kerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam persoalan yang digarap.

4. Melakukan upaya penyadaran terhadap komunitas tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami melalui melibatkan mereka dalam berpartisipasi dan bekerjasama pada semua proses research, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi.
5. Suatu proses untuk membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis yaitu, upaya menciptakan pemahaman bersama terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat secara partisipatif menggunakan nalar yang cerdas dalam mendiskusikan tindakan mereka dalam upaya untuk melakukan perubahan sosial yang cukup signifikan.
6. Merupakan proses yang melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial mereka. Dalam hal ini masyarakat dipandang lebih tahu terhadap persoalan dan pengalaman yang mereka hadapi untuk itu pendapat-pendapat mereka harus dihargai dan solusi-solusi sedapat mungkin diambil dari mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
7. Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji. Apapun pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi tentang institusi-institusi sosial yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat harus siap sedia untuk dapat diuji dan dibuktikan keakuratan dan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diperoleh di dalam masyarakat itu sendiri.
8. Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara cermat. Semua yang terjadi dalam proses analisa sosial, harus direkam dengan berbagai alat rekam yang ada atau yang tersedia untuk kemudian hasil-hasil rekaman itu dikelola dan diramu sedemikian rupa sehingga mampu mendapatkan data tentang pendapat, penilaian, tanggapan, reaksi dan kesan individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi secara akurat, untuk selanjutnya analisa kritis yang cermat dapat dilakukan terhadapnya.
9. Semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai objek riset. Semua individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat didorong untuk mengembangkan dan meningkatkan praktek-praktek sosial mereka sendiri berdasarkan pengalaman pengalamannya sebelumnya, yang telah dikaji secara kritis.

10. Merupakan proses politik dalam arti luas. Diakui bahwa riset aksi ditujukan terutama untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Karena itu mau tidak mau hal ini akan mengancam eksistensi individu maupun kelompok masyarakat yang saat itu sedang memperoleh kenikmatan alam situasi yang membelenggu, menindas, dan penuh dominasi. Agen perubahan sosial harus mampu menghadapi dan meyakinkan mereka secara bijak, bahwa perubahan social yang akan diupayakan bersama adalah demi kepentingan mereka sendiri di masa yang akan datang.
11. Mensyaratkan adanya analisa relasi sosial secara kritis. Melibatkan dan memperbanyak kelompok kerjasama secara partisipatif dalam mengurai dan mengungkap pengalaman-pengalaman mereka dalam berkomunikasi, membuat keputusan dan menemukan solusi, dalam upaya menciptakan kesefahaman yang lebih baik, lebih adil dan lebih rasional terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga relasi sosial yang ada dapat dirubah menjadi relasi sosial yang lebih adil, tanpa dominasi dan tanpa belenggu.
12. Memulai isu kecil dan mengaitkan dengan relasi-relasi yang lebih luas. Penelitian sosial berbasis PAR harus memulai penyelidikannya terhadap suatu persoalan yang kecil untuk melakukan perubahan terhadapnya, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap persoalan berskala yang lebih besar dengan melakukan perubahan yang lebih besar pula dan seterusnya.
13. Memulai dengan siklus proses yang kecil. (analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi dst.). melalui kajian yang cermat dan akurat terhadap suatu persoalan berangkat dari hal yang terkecil akan diperoleh hasil-hasil yang merupakan pedoman untuk melangkah selanjutnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar.
14. Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain. Dalam melakukan proses PAR peneliti harus memperhatikan dan melibatkan kelompok kecil di masyarakat sebagai partner yang ikut berpartisipasi dalam semua proses penelitian meliputi analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi dan refleksi dalam rangka melakukan perubahan social. Selanjutnya partisipasi terus diperluas dan diperbanyak melalui pelibatan dan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar untuk mengkritisi terhadap proses-proses yang sedang berlangsung.

15. Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman proses. PAR menjunjung tinggi keakuratan fakta-fakta, data-data dan keterangan-keterangan langsung dari individu maupun kelompok masyarakat mengenai situasi dan kondisi pengalaman-pengalaman mereka sendiri, karena itu semua bukti-bukti tersebut seharusnya direkam dan dicatat mulai awal sampai akhir oleh semua yang terlibat dalam proses perubahan sosial untuk mengetahui proses perkembangan dan perubahan social yang sedang berlangsung, dan selanjutnya melakukan refleksi terhadapnya sebagai landasan untuk melakukan perubahan sosial selanjutnya.
16. Mensyaratkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka. PAR adalah suatu pendekatan dan penelitian yang mendasarkan dirinya pada fakta-fakta yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Untuk itu proses pengumpulan data harus dilakukan secara cermat untuk selanjutnya proses refleksi kritis dilakukan terhadapnya, dalam upaya menguji seberapa jauh proses pengumpulan data tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar buku dalam penelitian sosial.

3.4. Tehnik Pendampingan dan Penelitian

Dalam penggalian data penulisan skripsi ini menggunakan metode pendampingan yang berbasis Participatory Action Research (PAR) yaitu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik.

Adapun langkah-langkah dalam PAR, yaitu:

1. **Penyiapan Sosial (Merancang Komunikasi Kemanusiaan)**

Dalam penyiapan sosial ini berarti mengetahui dan memahami masyarakat. Dalam proses ini pendamping berbaur dengan masyarakat untuk mengenali dan memahami masyarakat. Dengan melalui inkulturasi yang di bangun maka akan menciptakan komunikasi dengan masyarakat. Karena Peneliti berfikir bahwa jika komunikasi yang di bangun dengan masyarakat kuat maka aka lebih mudah untuk membangun partisipasi masyarakat dalam membantu peneliti.

Penyiapan social di lakukan dengan cara memahami kelompok yang tidak terorganisir dalam masyarakat, memahami peran dan fungsi lembaga yang ada di masyarakat dan mengenali tradisi yang dilakukan masyarakat.

2. *Community Riset Social Problem Diagnostic*

Yaitu menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami keseharian masyarakat maka pendamping dapat mengidentifikasi masalah. Selain itu pendamping juga melakukan FGD bersama masyarakat untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada. Pohon masalah pun juga di buat bersama masyarakat.

Selain itu yang di lakukan pendamping dalam menganalisis masalah yaitu dengan mapping, transek, memahami alur sejarah dan tradisi masyarakat. Diagram alur, diagram ven dan analisis social juga di gunakan dalam memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3. *Planning*

Istilah pengorganisasian rakyat (*people organizing*) atau yang lebih juga dikenal dengan istilah pengorganisir masyarakat (*community organizing*) sebenarnya adalah suatu peristilahan yang sudah menjelaskan dirinya sendiri. Istilah ini memang mengandung pengertian yang luas dari dua akar katanya. Istilah rakyat disini tidak hanya berarti satu perkauman (*community*) yang khas, dalam konteks yang lebih luas juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya. Istilah pengorganisasian disini lebih diartikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat. Sehingga bisa juga diartikan suatu cara pendekatan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah tersebut.

Planning adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini di lakukan bersama masyarakat. Dari pohon masalah yang di buat bersama masyarakat maka muncul pohon harapan yang berisikan harapan-harapan masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut. Pendamping bersama masyarakat merencanakan program yang akan di laksanakan. Dengan membuat proposal dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Pendamping bersama masyarakat mengadakan pertemuan-pertemuan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. *Political Action*

Yaitu membentuk kelompok-kelompok social baru. Hal ini dilakukan untuk pemecahan masalah. Dengan membangun leadership atau seorang pemimpin yang dapat mengorganisir masyarakat dan dapat melakukan analisis terarah sehingga mendorong proses transparansi atas semua pihak dan semua permasalahan. Kegiatan ini dilakukan bersama partisipasi masyarakat. Aksi yang di lakukan ini menjawab harapan-harapan masyarakat.

Dalam membangun membangun partisipasi masyarakat sebelum melakukan aksi tidak bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi atas nama, partisipasi pasif, partisipasi lewat konsultasi maupun partisipasi fungsional. Melainkan partisipasi yang dibangun adalah partisipasi interaktif, dimana ide dalam berbagai kegiatan mulai perencanaan dan evaluasi melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengambil inisiatif sendiri , melaksanakan kegiatan secara mandiri dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri.

5. *Reflection*

Yaitu tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua komponen aktifitas terhadap perubahan sosial yang menjadi visi masyarakat. Pendamping merefleksi dan menganalisis dari hasil kegiatan yang telah di lakukan.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Objektif Tempat Pengabdian Desa Ragawacana

Desa ragawacana adalah salah satu desa di kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan yang mempunyai luas 176.589 Ha. Jumlah penduduk desa Ragawacana 3.246 jiwa yang terdiri dari 1.683 laki-laki dan 1.585 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 891 KK sedangkan jumlah keluarga miskin (gaskin) 274 KK dengan presentasi 10% dari jumlah keluarga yang ada.

Gambar 4.1. Peta Desa Ragawacana Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan



Berdasarkan topografi dan kantor Tanah Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan secara umum berupa Sawah dan darat yang berada pada ketinggian antara 0 M s/d 500 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 17 s/d 26 celcius Desa Ragawacana terdiri dari 4 dusun 4 Rw 17 Rt. Orbitkan dan waktu temuh dari ibukota kecamatan 3 Km² dengan waktu tempuh 10 menit dan dari ibukita kabupaten 7 km² dengan waktu tempuh 15 menit.

4.1.1. Profil Desa

Luas wilayah Desa Ragawacana	: 176,589 Ha
a. Tanah Sawah	: 71,509 Ha
b. Pemukiman	: 23,931 Ha
c. Perkantoran/Pasilitas Umum	: 0,230 Ha
d. Lainnya	: 25.853 Ha
Penduduk	: 3.268 Jiwa
a. Laki-laki	: 1.683 Jiwa

b. Perempuan : 1.583 Jiwa

Gambar 4.2. Kantor Kepala Desa Ragawacana



Kepala Keluarga : 891 KK

a. Kepala Keluarga Laki-laki : 725 KK

b. Kepala Keluarga Perempuan : 166 KK

Jumlah Rumah : 526 Rumah

a. Rumah Permanen I : 520 Rumah

b. Rumah Permanen II : - Rumah

c. Rumah Semi Permanen : 2 Rumah

d. Rumah Biasa/Bilik : 4 Rumah

Sarana Pendidikan

a. Kelompok PAUD : 1 Kelompok

b. Taman Kanak-Kanak : - Kelompok

c. TPA : - Kelompok

d. SD : 2 Buah

e. MD ; - Buah

Sarana Kesehatan Masyarakat

a. Jamban Keluarga : 891 KK

b. KK Mempunyai Jamban : 887 KK

c. KK Tdk Mempunyai Jamban : 4 KK

Tanah Darat : 49,784 Ha

Tanah Sawah : 71,509 Ha

Dengan Batas-batas Desa sebagai berikut :

a. Sebelah Barat : Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya

- b. Sebelah Timur : Desa Cibentang Kecamatan Kramatmulya
- c. Sebelah Selatan : Desa Gunung Keling Kecamatan Cigugur
- d. Sebelah Utara : Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya

4.1.2. Sejarah Desa

Kira-kira pada tahun 1500 M. Desa Ragawacana berasal nama Bale Are dan waktu itu belum tersusun pemerintahan dan rakyatnya masih memeluk agama Hindu. Pada suatu hari di bulan Maulid telah lewat rombongan Gedeng Cigugur yang maksudnya serba ke Cirebon yaitu akan mengikikuti seba para Wali dan rombongan gedung Cigugur dengan kendaraan kereta berkuda. Syahdan disuatu kampung yang disebut Bale Are kereta kuda yang ditunggni Gedeng Cigugur tersebut kudanya rarad dan jatuhlah Gedung Cigugur dari keretanya sampai meninggal dunia, dan dimakamkan di Kampung Bale Are.

Salah seorang pengawalnya melanjutkan perjalanannya ke Cirebon untuk menyampaikan berita duka cita atas kecelakaan Gedeng Cigugur disuatu kampung yang disebut Bale Are menjadi Desa Ragawacana karena Gedeng Cigugur jasadnya dipendam di Bale Are sedang beritanya sampai ditempat siding jadi dengan arti **RAGA**yaitu **Badan WACANA** yaitu **Cerita** dan pada tahun kurang lebih 1500 M. Telah datang misi Islam dari Cirebon ke Kampung Ragawacana dari keturunan Gedeng kanggrasan yang disebut Gedeng Ragawacana dan mengatur pemerintahan disana dan dibentuklah lingkungan yang meliputi Ragawacana, Pajambon, Gandasoli, Cibentang dan Gunung Keeling dibawah Pemerintahan Gedeng Ragawacana dengan nama Desa Ragawacana, Geeng Ragwacana mempunyai anak 7 Orang yaitu

1. Raden Mustapa
2. Tuang Tengah
3. Tuan Sadamaya
4. Niti Putih
5. Niti Sara
6. Wana Kuru
7. Gedeng Panarangan

Dan Pemerintah Desa Ragawacana sejak tahun 1500 M, sampai kurang lebih 1700 M Dipegang oleh keturunan Gedeng Ragawacana dan melanjutkannya dirobah menjadi kademangan dengan pimpinan pemerintahan bernama Demang sampai kurang lebih 1800 M dari tahun 1800 M sampai sekarang pemerintah dipegang oleh kuwu sebagai kepala pemerintahan dengan istilah para kuwu sebagai berikut :

1. Kuwu Sukimin	1800 – 1840
2. Kuwu Rundeng	1840 – 1858
3. Kuwu Yuda Diwangsa	1858 – 1861
4. Kuwu Anggadikarana	1861-1862
5. Kuwu Natakrama	1862 – 1881
6. Kuwu Selat Jayasasmita	1881-1917
7. Kuwu Sastra Santana	1917 – 1919
8. Kuwu Jaya Sasmita	1919 – 1920
9. Kuwu Sastra Santana	1920 – 1923
10. Kuwu Prawira Sasmita	1923 – 1928
11. Kuwu Singa Wilastra	1928
12. Kuwu Amir	1928 – 1931
13. Kuwu Wiryana Suminta	1931 – 1933
14. Kuwu Karna Sasmita	1933 – 1946
15. Kuwu Mad Saeh	1946 – 1948
16. Kuwu Wiryana Suminta	1948 – 1949
17. Kuwu Sumarta Sidastra	1949 – 1967
18. Kuwu Wijaya Prawira	1967 – 1973
19. Kuwu M Rachmanudin	1973 – 1989
20. Kuwu Dedi Djuhana	1989 – 1998
21. Kuwu Uju Djuheni	1998 – 2007
22. Kuwu Sutini	2007 – 2013
23. Kuwu Sutini	2013 – 2019

Gambar 4.4. Tim Pengabdian Bersama dengan Kepala Desa Ragawacana



Itulah riwayat singkat Desa Ragawacana dan Kuwu yang pernah memerintah Desa Ragawacana, semoga akan dijadikan tambahan dalam catatan sejarah bagi kita semuanya khususnya masyarakat Desa Ragawawacana.

Susunan pemerintah tidak tercatat tahun dari awal, karena terbatas informasi yang bisa dihimpun, Susunan pemerintahan Desa Ragawacana yang tercatat adalah :

1. Laporan Kepala Dusun
2. Laporan Kaur Pemerintahan
3. Laporan Kaur Ekbang
4. Laporan Kaur Kesra
5. Laporan Kaur Umum

Gambar 4.5 STOK Desa Ragawacana



4.1.3. Keadaan Sosial

Dilihat dari tingkat pendidikan Penduduk Desa Ragawacana terbagi atas :

- Tidak Tamat SD : 6 Orang
- Lulusan SD/ Sederajat : 504 Orang
- Lulusan SLTP/Sederajat : 447 Orang
- Lulusan SLTA/Sederajat : 737 Orang
- Lulusan D-1/Sederajat ; - Orang
- Lulusan D-2/Sederajat : 2 Orang
- Lulusan D-3/Sederajat : - Orang
- Lulusan S-1 : 35 Orang
- Lulusan S-2 : 2 Orang
- Lulusan S-3 : - Orang

Sedangkan dari segi mata Pencaharian terdiri atas :

- Petani : 499 Orang
- Buruh : 217 Orang
- PNS : 17 Orang
- Pedagang : 2 Orang
- Karyawan Swasta : 25 Orang
- Wirausaha lainnya : 25 Orang

4.1.4. Keadaan Ekonomi

- a. KK Miskin : 210 KK
- b. Penduduk Usia Kerja : Orang
- c. Pendapatan Masyarakat : 10 Orang
- d. Tingkat Kesejahteraan
Keluarga Pras Sejahtera ; 25 KK
Sarana Perekonomian
 - a. Jalan Desa : 800 M
 - b. Jalan Lingkungan : 5000 M
 - c. Tanah Sawah : 71,509 Ha
 - d. Irigasi : 9.897 M

- e. Kelompok Tani/Gapoktan : 7 Kelompok
- f. Industri Kecil : - buah

4.1.5. Kondisi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Ragawacana saat ini mempunyai perangkat Desa sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala Desa 1 Orang Kepala Desa, Kepala Urusan 4 Orang, Rurah 4 Orang.

Adapun lembaga desa lainnya, baik itu lembaga pemerintahan Desa maupun Lembaga kemasyarakatan antara lain :

- ❖ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 10 Orang
- ❖ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) : 10 Orang
- ❖ PKK : 31 Orang
- ❖ Karangtaruna : 15 Orang
- ❖ GAPOKTAN : 3 Orang
- ❖ Anggota Linmas : 6 Orang

Disamping itu ada aspek pemerintahan lainnya yang menjadi kewajiban Desa untuk melaksanakan Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2009 s/d 2014 target PBB yang menjadi Kewajiban Desa Ragawacana selalu 100%.

Gambar 4.6. Koperasi Desa Ragawacana



4.1.6. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa dari aspek Pemerintah terdiri dari :

- ❖ Jumlah Dusun : 4 Dusun
- ❖ Jumlah RW : 4 RW
- ❖ Jumlah RT : 17 RT

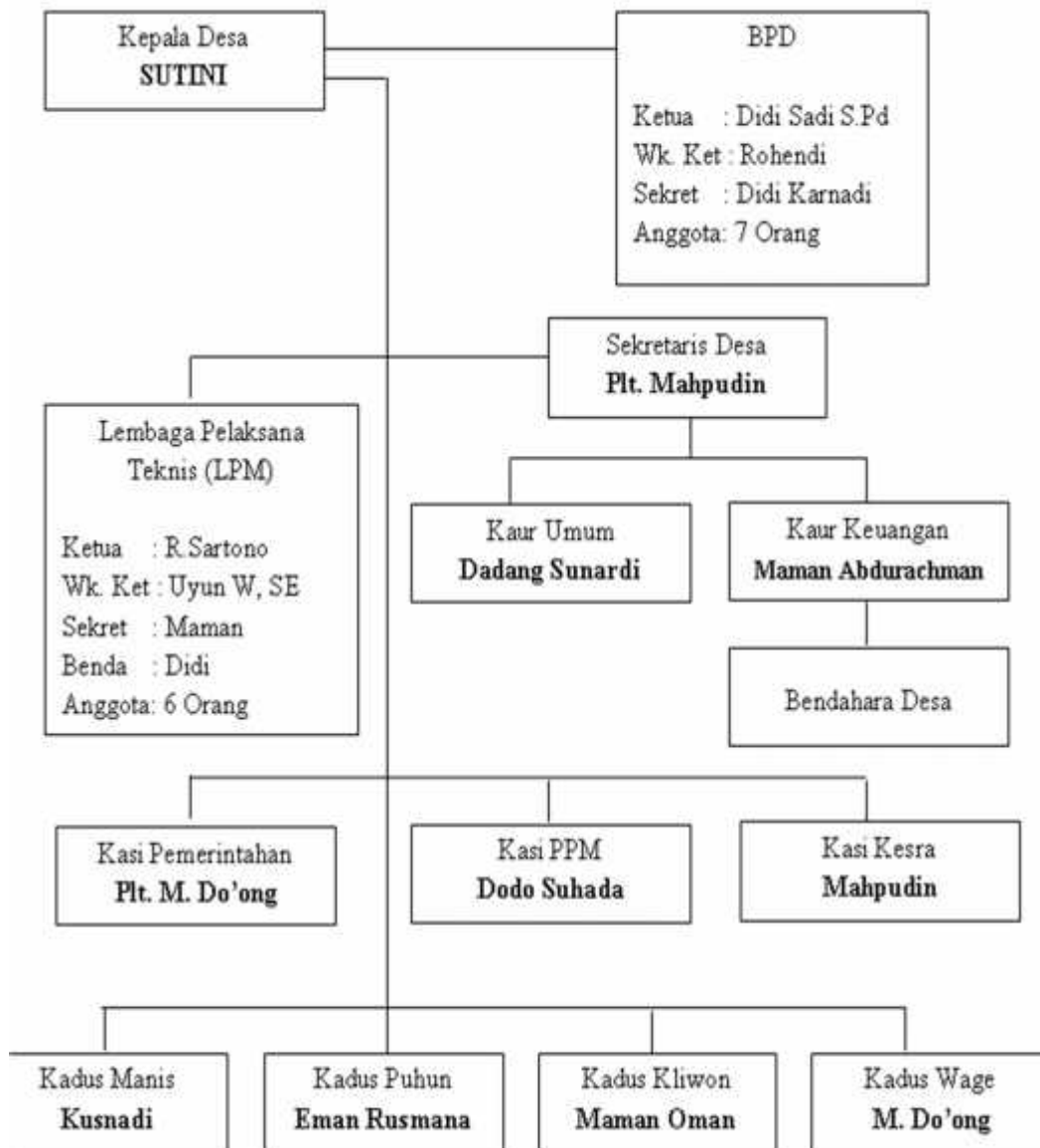
4.1.7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan pada saat ini terdiri dari :

- ❖ Kepala Desa : Ada
- ❖ Ketua Badan Permusyawaratan Desa : Ada
- ❖ Sekretaris Desa : Tidak Ada
- ❖ Bidang Pemerintahan/Ngabihi : Ada
- ❖ Bidang Ekonomi Pembangunan/Raksabumi : Ada
- ❖ Bidang Kaur Umum : Ada
- ❖ Bidang Keuangan : Ada
- ❖ Bidang Agama dan Kesejahteraan/Ketib : Ada
- ❖ Kepala Dusun
 - Kadus Manis : Ada
 - Kadus Puhun : Ada
 - Kadus Kliwon : Ada
 - Kadus Wage : Ada

Untuk lebih jelas struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 4.7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ragawacana



4.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian di Desa Ragawacana dilaksanakan dari tanggal 13 November 2015 sampai 30 Desember 2015. Secara garis besar kegiatan pengabdian dibagi ke dalam dua kegiatan. Pertama adalah kegiatan-kegiatan penguatan *softskill* dalam bentuk seminar dan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan antara lain 1) Pelatihan Koperasi, 2) Seminar Motivasi Kewirausahaan, 3) Pelatihan Akuntansi Koperasi, 4) Pelatihan Marketing, 5) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemerintahan Desa, 6) Pelatihan Teknologi Tepat Guna. Kedua adalah kegiatan pendampingan untuk memastikan bahwa output dari kegiatan pelatihan-pelatihan sebelumnya dapat diterapkan dan dipraktikkan oleh masyarakat sasaran. Secara umum bisa dilihat dari gambar jadwal kegiatan pengabdian.

Gambar 4.8. Jadwal Kegiatan Program Pengabdian di Desa Ragawacana



4.2.1. Pelatihan Koperasi

Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia, begitulah kira-kira cita-cita yang dititipkan oleh Bung Hatta kepada bangsa Indonesia. Namun realitasnya, hingga saat ini koperasi masih belum mampu menjadi tiang utama penyangga ekonomi bangsa, dan ironisnya eksistensi koperasi seperti “*mati enggan hidup mau*”. Secara konsep koperasi merupakan wujud ideal dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan bangsa Indonesia dalam membangun ekonomi pancasila. Letak permasalahan bukan pada tataran konsep, melainkan sumberdaya manusia, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya koperasi yang mampu beroperasi dan *survive* dengan baik. Maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas

sumberdaya koperasi untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

Adapun tujuan dari pelatihan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi desa sehingga mampu eksis dan bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya di masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kreativitas sumberdaya manusia yang ada di koperasi, sehingga mampu mengembangkan dan memajukan lembaga koperasi menjadi lebih baik lagi.

Pelatihan koperasi adalah kegiatan program pengabdian yang pertama kali dilakukan. Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 13-14 November 2015 bertempat di Kantor Kepala Desa Ragawacana dan dihadiri oleh 23 orang pengurus dan anggota koperasi desa Raga Jaya Lestari. Hari pertama pelatihan diisi oleh pemateri Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si yang menyampaikan dasar-dasar manajemen koperasi yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang koperasi. Masalah utama yang sering terjadi dalam koperasi adalah keterbatasan SDM yang kurang kompeten, sehingga pengelolaan koperasi desa seakan hanya sebatas sampingan dan tidak profesional. Padahal bila koperasi dikelola secara baik dan profesional, maka akan mampu mengangkat tingkat perekonomian dari pengurus maupun anggota koperasi itu sendiri (*lihat gambar*).

Sedangkan pada hari kedua menghadirkan pemateri kedua, yaitu Ibu Yusi Susilawati dalam penjelasannya menyebutkan bahwa bila ingin mendirikan koperasi yang maju dan eksis harus diletakkan aturan mainnya dulu, dimana aturan main tersebut harus dipatuhi oleh semua pengurus dan anggota koperasi. Misalnya, setiap pengurus dan anggota wajib menyetorkan simpanan wajib dan pokoknya setiap tanggal 10 setiap bulan, maka hal itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh semua pihak. Sebab dengan komitmen dan profesionalisme lah koperasi yang maju dapat diwujudkan.

Gambar 4.9 : Pemateri Pelatihan Koperasi (Bapak Dr. Ayus A Yusuf)



4.2.2. Seminar Motivasi Kewirausahaan

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa pekerjaan yang paling menjanjikan adalah menjadi pegawai kantoran atau lebih tepatnya menjadi pegawai negeri. Sedikit sekali yang memiliki pandangan ingin melakukan atau membangun usaha dan menjadi seorang wirausahawan (*interpreneur*). Padahal kemajuan suatu daerah dapat diukur dari seberapa banyak jumlah wirausahawan (*interpreneur*) yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak wirasusaha yang terdapat daerah maka dapat dipastikan semakin maju daerah tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sampai saat ini masih tergolong ke dalam negara berkembang (*emerging country*), sebab dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari total 250 juta penduduk Indonesia, yang menjadi wirausahawan tidak lebih dari 3% saja. Padahal untuk menjadi negara maju, diperlukan setidaknya 20% dari jumlah penduduknya adalah wirausahawan.

Adapun tujuan dari seminar motivasi kewirausahaan ini adalah untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada audiens akan pentingnya berwirausaha dan memberikan motivasi dan kepercayaan diri untuk menjadi wirausahawan. Setelah mengikuti kegiatan seminar motivasi kewirausahaan ini para peserta diharapkan akan lebih termotivasi dan lebih percaya diri untuk berwirausaha. Selain itu para peserta juga akan mampu mencari peluang-peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan mereka sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian di daerahnya masing-masing.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 17-18 Nopember 2015 ini berlangsung dengan baik, hal ini terlihat dari antusiasme para peserta dalam mengikuti paparan dan penjelasan dari para pemateri. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Wasman menjelaskan tentang pandangan-pandangan Islam terkait dengan wirausaha. Dalam penjelasannya pemateri menyampaikan bahwa menjadi wirusahawan adalah pilihan terbaik bagi umat Islam, sebab Nabi Muhammad sendiri adalah seorang wirausahawan yang sukses. Sementara pemateri kedua yaitu Bapak Ben Hardi, SE menjelaskan lebih detail bagaimana kiat-kiat awal merintis usaha. Pemateri menceritakan awal mula merintis usaha Jerus Nipis Peras merek Jenissa yang beliau miliki berawal dari modal hanya Rp. 3.000.000 dan dengan perakatan rumah tangga seadanya. Namun dengan kemauan dan tekad yang pantang menyerah akhirnya kini usahanya sudah sangat sukses. Pada akhir acara dilakukan sesi tanya jawab yang cukup intens antara pemateri dengan peserta yang begitu antusias menanyakan hal-hal terkait penjelasan dari pemateri (*lihat gambar*).

Gambar 4.10. Peserta Seminar Kewirausahaan



4.2.3. Pelatihan Manajemen dan Akuntansi Koperasi

Pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga seperti koperasi maupun lembaga keuangan mikro sangatlah penting, sebab dengan adanya pengelolaan dan pelaporan yang baik akan bisa menjaga sisi kredibilitas dan akuntabilitas lembaga tersebut. Oleh sebab itulah mutlak bagi pengurus maupun anggota koperasi memiliki keterampilan akuntansi, sehingga dapat menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus mampu menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi dalam memahami dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan tentang akuntansi keuangan koperasi, terutama untuk koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam, maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam. Dengan kegiatan ini diharapkan pengurus dan pengelola keuangan koperasi dapat terbantuan dalam menyusun serta menginformasikan laporan keuangan usaha koperasi kepada anggota dan pihak lain yang berkepentingan.

Adapun tujuan dari seminar motivasi kewirausahaan ini adalah dengan kegiatan ini diharapkan pengurus dan pengelola keuangan koperasi dapat terbantuan dalam mengelola keuangan dengan menyusun serta menginformasikan laporan keuangan usaha koperasi kepada anggota dan pihak lain yang berkepentingan. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi ini para peserta diharapkan mampu menyiapkan dan menyusun laporan keuangan koperasi dan lembaga keuangan mikro dengan baik dan benar.

Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk koperasi ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 Nopember 2015 berlangsung dengan baik. Para pemateri menyampaikan ulasan yang sangat fokus pada pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan untuk koperasi desa. Pemateri pertama Bapak Wartoyo, MSI menyampaikan dasar-dasar dari akuntansi, dimana sangat penting setiap instansi untuk menyusun dan menyampaikan pelaporan keuangan secara rutin dan berkala. Hal ini terkait dengan beberapa aspek diantaranya adalah aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Selain itu urgensi dari adanya pelaporan keuangan juga adalah untuk dapat mengakses pendanaan yang biasanya disalurkan oleh perbankan maupun pemerintah melalui program bantuan pemberdayaan koperasi. Dengan adanya laporan keuangan yang baik maka para donatur tidak akan segan untuk meyalurkan bantuan. Pemateri kedua yaitu Ibu Hj. Dra. Titin Sumartini, M.Pd menyampaikan materi yang lebih ke praktik pengelolaan, pencatatan dan perhitungan akuntansi dalam koperasi, para peserta pun langsung diminta mempraktikkan agar dapat memahami dan menguasai teknis akuntansi dengan cepat dan tepat (*lihat gambar*)

Gambar 4.11. Pemateri Akuntansi Koperasi Dra. Hj. Titin Sumartini



4.2.4. Pelatihan Marketing

Marketing atau pemasaran merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan untuk memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Pemasaran sebuah harus memiliki suatu metode tertentu, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa terjual dengan maksimal. Terdapat beberapa metode marketing yang selama ini sudah lazim dilakukan seperti *personal*

selling, door to door selling dan *online selling* dan masih banyak lagi. Masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk itulah perlu diberikan pelatihan marketing bagi pengurus dan kelompok wanita di desa Ragawacana untuk memasarkan produk-produk hasil olahannya. Sebab selama ini dari beberapa kelompok wanita yang ada, mereka rata-rata bisa menghasilkan produk yang unik dan variatif, namun sampai sekarang pemasarannya masih belum mampu menjangkau luar daerah. Padahal bila dilihat produk yang dihasilkan cukup berkualitas dan menari seperti produk tas dan dompet dari bekas bungkus permen, kripik singkong aneka rasa, aneka olahan ubi jalar dan masih banyak lagi hasil atau produk yang bisa dihasilkan oleh kelompok-kelompok wanita di desa Ragawacana. Untuk itulah penting kiranya untuk dilakukan suatu pelatihan marketing yang diharapkan dapat memberikan masukan atau ide dalam memasarkan produk-produk hasil kreativitas dari kelompok-kelompok wanita (KOPWAN) tersebut.

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan bagi para anggota dan pengurus kelompok wanita untuk memasarkan produk-produk secara lebih baik dan menarik. Pelatihan ini bermanfaat untuk memberikan alternatif dan metode lain dalam melakukan pemasaran yang berbeda dari metode marketing yang selama ini sudah dilakukan. Sehingga diharapkan akan semakin memajukan dan mensejahterakan kelompok wanita yang ada di desa Ragawacana.

Pada pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Nopember 2015 ini dihadirkan dua orang narasumber yang berkompeten dalam materi marketing ini. Narasumber pertama menyampaikan dasar-dasar marketing, dimana marketing adalah ujung tombak dari suatu perusahaan, sebab bila sampai marketing suatu perusahaan tidak berjalan efektif, maka perusahaan tersebut pasti akan mengalami kesulitan dalam semua aspek seperti aspek keuangan, produksi dan distribusi. Sedangkan narasumber kedua menjelaskan materi yang lebih teknis dan metode pemasaran yang efektif. Diantara hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran adalah bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu *place, product, price and promotion*. Untuk menciptakan suatu pemasaran yang baik harus diperhatikan *place*, atau tempat-tempat yang tepat untuk melakukan pemasaran, misalkan sekarang dengan menggunakan medsos untuk mempermudah dan memperringan biaya. Kedua adalah *product*, dimana produk yang akan dipasarkan harus dipacking secara menarik, ketiga adalah *price*, atau harga, usahakan berikan harga yang kompetitif untuk produk yang akan dipasarkan sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Dan terakhir adalah *promotion* atau promosi,

dimana diperlukan promosi untuk memperkenalkan produk yang akan dipasarkan minimal dengan membuat brosur atau selebaran terkait produk tersebut (*lihat gambar*)

Gambar 4.12. Suasana Pelatihan Marketing



4.2.5. Pelatihan Manajemen dan Keuangan Desa

Manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematis dan terus menerus, mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Pekerjaan kantor atau tata usaha, sering disebut dengan istilah *office work* atau *clericalwork*. Manajemen perkantoran meliputi pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas ketatausahaan dari sebuah kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehemat-hematnya (seefisien mungkin) yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor itu disebut manajemen perkantoran (*Office Management*). Manajemen perkantoran dapat dikatakan sebagai kekuatan yang tidak terlihat (tidak terwujud) yang merencanakan, mengorganisasi dan mengkoordinasikan manusia, uang, metode, material, mesin-mesin, dan pasar (GM) dalam pekerjaan kantor serta mengarahkan dan megawasinya sesuai dengan tujuan pembinaan, serta tujuan organisasi tercapai.

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah agar tercipta tata kelola perkantoran yang baik dan profesional sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya untuk masyarakat desa Ragawaacana Kecamatan Karamatmulya. Manfaat dari kegiatan ini adalah para staf dan perangkat desa Ragawacana mampu menyusun arsip perkantoran dengan rapi,

simpel dan mudah dicari ketika dibutuhkan Kegiatan ini akan dilaksanakan di Balaidesa desa Ragawacana Kecamatan Karamatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2015 pukul 08.00 – 16.00 WIB (lihat gambar)

Peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari para pejabat BPD, LKM, dan perangkat desa Ragawacana. Pelatihan ini menyoroti para pejabat dan perangkat desa Ragawacana terkait dengan pentingnya pengelolaan kearsipan dan keuangan desa yang selama ini masih terkesan belum tertata rapi sehingga terkadang membuat kesulitan tersendiri dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemateri pertama memaparkan tentang pentingnya pengelolaan kearsipan yang baik, sebab dengan pengelolaan yang baik akan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan. Sedangkan pemateri kedua mempresentasikan bagaimana teknis pengarsipan yang baik, misal dengan penggunaan metode alfabetis sehingga semua berkas yang ada dapat dikategorikan menurut huruf yang telah ditempatkan dalam direktorinya masing-masing. Dengan demikian ketika hendak mencari dokumen yang dibutuhkan akan dengan cepat menemukan tanpa harus mengaduk-aduk semua dokumen yang ada. Selain itu bisa juga dengan teknik atau metode list cabinet, dimana dokumen akan dilistkan dalam boks-boks yang sejenis dan berurutan sesuai dengan periode waktu. Dengan demikian dapat diurutkan dengan mudah dan juga dapat dilihat mana dokumen yang masih terpakai dan mana dokumen yang sekiranya sudah tidak lagi dipakai.

Gambar 4.13. Pemateri Pelatihan Manajemen Keuangan Desa Dr. Sugianto



4.2.6. Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Sampah saat ini sudah menjadi masalah suatu kota, dampak buruk yang ditimbulkannya sangat kompleks di antaranya dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, menurunnya nilai estetika suatu daerah/kota, mengurangi usia operasi TPA, tingginya biaya operasi dan pemeliharaan pengelolaan sampah (mulai dari sumber, pengumpulan, transfer & transport sampai ke TPA), menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat yang sudah sadar akan penting kebersihan dan lingkungan sehat dengan adanya sampah yang berserakan.

Selain dampak buruk, melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) sampah juga mempunyai keuntungan yang bisa dimanfaatkan : **Reduce** adalah upayamengurangi volume sampah, contoh : dengan memanfaatkan tas belanjaan untuk kepasar sehingga mengurangi pemakaian kantong plastik/kresek; **Reuse** adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa melakukan perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat, contoh : kaleng cat dijadikan pot tanaman dan untuk kaleng cat besar dapat digunakan sebagai tempat sampah; **Recycle** adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat, contoh : sampah plastik dapat diolah menjadi tas, sandal atau payung dan sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos (*lihat gambar*)

Dengan mengacu kepada keberadaan kondisi sebagaimana tersebut diatas perlu penanganan yang cermat terhadap masalah sampah ini sehingga masalah timbulan sampah dapat teratasi dan dengan penanganan sampah yang baik dapat menambah *income* bagi masyarakat. Salah satu di antaranya adalah pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat (TPST 3R) di desa Ragawacana yang mana hal ini sebagai langkah awal dalam menyongsong kebijakan baru pengelolaan sampah kota di mana sampah harus dikurangi mulai dari sumbernya dan sampah harus diolah untuk dimanfaatkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

Pelatihan ini bertujuan untuk memeberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pengurus daan anggota kelompok TPST3R Desa Ragawacana dalam memanfaatkan limbah sambah menjadi produk olahan daur ulang yang bernilai tinggi, berdaya saing dan dapat menghasilkan income tambahan untuk para anggotanya. Pelatihan ini bermanfaat untuk menciptakan produk-produk dari bahan limbah yang sudah tidak terpakai menjadi beragam

produk dengan menggunakan bahan-bahan limbah bekas yang terdapat di sekitar desa Ragawacana kecamatan Karamatmulya.

Dalam pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 01-02 Desember 2015 dihadiri dua orang narasumber. Dalam pemaparannya para narasumber lebih menyoroti pada pemanfaatan limbah rumah tangga yang selalu melimpah setiap harinya. Selama ini limbah sampah kebanyakan hanya diolah menjadi pupuk kompos dan sejenisnya, namun pada . Masalah sampah saat ini termasuk sepele. Tetapi, jika kita sadari bahwa setiap orang mengeluarkan sampah dan akhirnya sampah tersebut akan menggunung. Untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik lalu menjadikan sebagai pupuk,tas,dll. Sampah bisa diolah dengan berbagai cara salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R. Metode ini bisa dilakukan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik yaitu dengan cara membuat tempat sampah khusus untuk sampah organik dan anorganik. Dengan memilah sampah organic dan anorganik kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Gambar 4.14. Suasana Pelatihan Teknologi Tepat Guna



4.3. Pendampingan

Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Konstitusi mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat. Konteks dalam mensejahterakan rakyat bukan hanya dalam satu bidang tetapi dari berbagai bidang seperti bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Disamping itu juga terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya perekonomian khususnya pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).

Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan memberikan kontribusi besar bagi negara khususnya di bidang perekonomian, karena KUMKM salah satu pendorong meningkatnya perekonomian masyarakat berkembang kearah yang lebih baik.

Suatu perekonomian dikatakan baik atau meningkat yaitu ketika taraf hidup masyarakat atau kebutuhan masyarakat terpenuhi, dengan kata lain sejahtera, hal ini pasti tidak terlepas dari namanya KUMKM yang telah memberikan kontribusi besar. Tetapi kenyataannya sekarang ini KUMKM memiliki tantangan yang sangat besar yaitu pada tahun 2015 akan terjadi MEA, dimana KUMKM akan bersaing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan KUMKM itu sendiri dengan cara membuat gebrakan baru baik dari sistem, strategi dan lain-lain.

Ketika KUMKM memiliki tantangan dan permasalahan tersebut, disinilah tugas dan peranan masyarakat baik dari tingkat birokrasi atau pemerintah, praktisi dan akademisi untuk saling bahu membahu membantu KUMKM agar tetap bertahan dan berkembang lebih baik lagi demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

Desa Ragawacana di Kecamatan Keramat Mulya Kabupaten Kuningan merupakan salah satu desa di Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki KUMKM cukup banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian khususnya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Saat ini KUMKM di Kabupaten Kuningan mengalami perkembangan yang sangat baik dari tahun ke tahunnya, dan hal ini merupakan suatu potensi bagi Kabupaten Kuningan, terlepas dari itu juga permasalahan yang dihadapi masih perlu diperhatikan oleh masyarakat dikalangan Pemerintah, Praktisi dan Akademisi yang perlu serta membantu KUMKM di Kabupaten Kuningan berkembang lebih baik.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat disini yaitu perubahan kearah yang lebih baik dan berkembang dengan tujuan akhir mencapai masyarakat yang sejahtera. Disamping itu juga Pemerintah, Praktisi, dan Akademisi memiliki cara untuk meningkatkan KUMKM di Kabupaten Kuningan salah satunya yaitu dengan Pendampingan, dengan adanya pendampingan di lapangan ini diharapkan adanya penguatan yang dilakukan pendamping menjadi stimulus atau mediasi bagi KUMKM lebih berakselerasi berkembang ke arah yang lebih baik.

Dari latar belakang diatas, terdapat tujuan sebagai berikut :

1. Terbentuknya KUMKM yang mandiri dan berdaya saing.
2. Terbentuknya unit usaha mandiri bagi kelompok wanita usaha KUMKM dan masyarakat umum.
3. Jaringan usaha sudah *eshtablised* dan operasional.
4. Terwujudnya masyarakat atau kelompok usaha yang menjadi pengusaha sebagai hasil dari program.

Ruang lingkup dalam kegiatan Pendampingan KUMKM di Desa Ragawacana adalah Sumber Daya KUMKM, Pengembangan Usaha KUMKM, Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan KUMKM, Sarana dan Prasarana KUMKM, Pengembangan Informasi Teknologi dan Jaringan KUMKM.

Sistematika penyajian dan kegiatan pendampingan didasarkan pada data yang sudah ada di KUMKM beserta permasalahannya, pendampingan ini terfokus kepada kelompok usaha wanita, koperasi wanita dan kelompok-kelompok usaha lainnya.

Permasalahan yang dihadapi Koperasi, Kelompok Wanita, dan Kelompok Tani (ternak).

1. Kelompok wanita dan koperasi masih mempunyai kekurangan dalam permodalan atau keuangan sehingga masih perlu dibantu dalam pengembangan usaha.
2. Kelompok tani memiliki masalah berupa kekurangan modal untuk membeli kebutuhan budi daya ikan lele seperti terpal dan sebagainya.
3. Kelompok Ternak yaitu budidaya ternak domba, untuk keuangan kelompok ini masih membutuhkan permodalan.
4. Kelompok usaha wanita masih mempunyai permasalahan didalam permodalan, karena kelompok ini masih kekurangan modal untuk proses produksi

5. Kelompok tani cenderung lebih ke pakan, dan sama halnya dengan yang lain masih membutuhkan modal atau kekurangan modal dalam pengembangan usahanya.
6. Permintaan produk saat ini semakin meningkat, hal ini disebabkan karena penggunaan produk bisa digunakan untuk semua komoditi seperti : tanaman padi, tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, tanaman bawang, dan lain-lain
7. Masih terbatasnya jaringan pemasaran
8. Strategi pemasaran belum memaksimalkan teknologi yang sudah ada
9. Terbatasnya kelompok usaha yang sejenis
10. Permintaan terhadap ikan lele sekarang semakin meningkat karena banyaknya masyarakat membuka usaha dibidang kuliner / seafood sehingga permintaan terhadap ikan lele semakin meningkat.
11. Hasil kelompok usaha wanita ini yaitu produk makanan ringan seperti dendeng abon, sistik dan lain-lain, permintaan terhadap produk ini sangat tinggi karena banyak permintaan dari masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi belum terpenuhi dengan penawaran produk.

4.4 Hambatan Pendampingan

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam memberikan pendampingan, terdapat beberapa jenis kendala atau permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM, yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga tampak pada ketidakmampuan mereka dalam hal manajemen usaha, terutama dalam hal tata tertib pencatatan / pembukuan.
2. Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.
3. Kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi jika dikelola secara mandiri.
4. UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pendanaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau

mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional -meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan- demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Gambar 4.15. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Sosialisasi Program	x	x											
4	Pembinaan Kelompok Wanita/koperasi:													
	1. Aspek SDM dan Kelembagaan					x								
	2. Aspek Sarana Prasarana					x								
	3. Aspek Pemasaran					x								
	4. Aspek Pengembangan Usaha					x								
	5. Aspek IT dan Jaringan KUMKM					x								
5	Pelatihan Kelompok Usaha						x	x	x					
6	Pendampingan program									x				
7	Monitoring dan Evaluasi										x	x	x	

4.5 Hasil Pendampingan

Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian manfaatnya sangat berarti karena dengan pendampingan ini pemerintah desa dan masyarakat bisa mengetahui sisi kelebihan dan kelemahan KUMKM yang berada di Desa Ragawacana, oleh karenanya kami selaku pendamping menyampaikan inspirasi KUMKM kepada pemerintah desa khususnya agar nantinya apa yang menjadi kendala bagi KUMKM yang tidak mampu dilakukan oleh pendamping dapat terjawab dan terselesaikan

Dalam poin ini asumsi kami sekaligus saran kami sebagai Pendamping yaitu perlu diadakan semacam motoring kinerja dan pembinaan serta pendampingan secara terus menerus kepada KUMKM, agar kita bisa melihat perkembangan KUMKM di lapangan dengan baik.

Gambar 4.16. Kegiatan Pendampingan Koperasi



Gambar 4.17. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi



Gambar 4.18 Pendampingan Pembuatan Produk Makanan



Gambar 4.19 Produk-Produk Usaha Kelompok Wanita



Gambar 4.20 Produk Usaha Daur Ulang Sampah



Gambar 4.21. Salah Satu Jenis Produk Kreativitas Kelompok Wanita



Gambar 4.22. Salah satu Jenis hasil produk Kreativitas Kelompok Wanita



Gambar 4.23. Suasana Pendampingan Koperasi



Gambar 4.24. Kegiatan Pendampingan Peternak Ikan lele



Gambar 4.25. Lokasi Peternakan ikan lele



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pemberdayaan kaum perempuan di desa Ragawacana dilakukan dengan memperkuat peran dua institusi yaitu lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi desa dan kelompok-kelompok wanita yang ada di desa Ragawacana.
2. Penguatan peran lembaga Keuangan mikro dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan softskill diantaranya pelatihan koperasi, pelatihan manajemen SDM, dan pelatihan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi.
3. Penguatan peran kelompok wanita dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan atau softskill dalam bentuk seminar keirusahaan, pelatihan Marketing, dan pelatihan teknologi tepat guna.

5.2. Saran

1. Kegiatan pelatihan sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan para peserta dalam mengelola lembaganya, namun tetap diharapkan pendampingan dari tim pengabdian.
2. Program kegiatan yang dilakukan berjalan sudah cukup baik, namun belum terlihat antusiasme dari masyarakat, karena dari kegiatan ke kegiatan peserta yang hadir cenderung satgnan, oleh sebab itu diharapkan kedepan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan lebih bermanfaat bagi orang yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, DandJ .A. Robinson. 2012. Why Nation Fail : The Origin of Power, prosperity and Poverty.Crown Publishing newYork
- Anonim. 2006. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro. www.profi.or.id/ind/downloads/
- Aris Ahmad Risadi, 2014, Sengkarut Daerah Tertinggal: Buah Terlarang Desentralisasi.Leutikaprio,Ygyakarta
- Ashari, 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No.2,Juni.
- Charles and Dorine, 2012, Effect of Microfinance Serviceson the Financial Empowerment of Youthin Migori County, Kenya.
- Darwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, Jakarta,2003.
- Darwin(Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,Pusat penelitian Ekonomi–LIPI, Jakarta, 2003.
- Didin Wahyudin, Key Succes Factors In Micro Financing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, Desember2004.
- Ismawan,B. Dan S.Budiantoro. 2005. Mapping Microfinance in Indonesia. Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005.
- JaegulChoo, Changhyun LEEan ddkk, 2012, Understanding and Promoting Micro-Finance Activities in Kiva.Org
- Karakteristik Orang Kecil. Harian Kompas.Rabu,13 Agustus 2003
- Krishnamurti, B. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel-Th.II-No.2-April 2003.
- Krishnamurti,B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
- Kementerian KUMK. 2006. Martowijoyo,S .2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Jurnal Ekonomi Rakyat,Th1, No.5, Juli 2002.

- Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000. Mikro. <http://www.profi.or.id/ind/>.
- Nadia Asghar, 2012, Microfinancing for Poverty Reduction: An Empirical Study of Rural Areas Tehsil Gujarat-Pakistan
- Robinson, Marquiere, 2000, The Micro Finance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, The World Bank.
- Rokhmin Dahuri, 2012, Mengelola Pembangunan Berkelanjutan Di Tengah Perubahan Iklim Global., RODA Bahari, Bogor
- Rokhmin Dahuri, 2013, The Blue Future of Indonesia, RODA Bahari, Bogor
- Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta.
- Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan, Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia, Ekonomi Rakyat, Th. II- No. 1- Maret 2003. <http://www.ekonomirakyat.org/edisi13/artikel3.htm>.
- Setyo Budiantoro, 2003, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 8, Nopember 2003, Yogyakarta.
- Sudaryanto, T. Dan M. Syukur. 2002. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Hlm. 101-121. dalam Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syamdan M. Ariani (Eds). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No. 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sumodiningrat, G. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan otonomi Daerah. Artikel Th II No 1. Jurnal Ekonomi Pertanian. www.ekonomirakyat.go.id.
- Syukur, M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit
- Syukur, M., 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapangan. Warta Prima Tani. Volume 1 Nomor 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

- Usman,S.,W.I.Suharyo, B.Sulaksono, M.S. Mawardi, N.Toyamah, dan Akhmadi. 2004.Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Wijono, W.2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi ,Keuangan dan Kerjasama Intemasional. Departemen Keuangan.
- Wijono, WW.,2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf>

DAFTAR TABEL

2.1	<i>Women in Development (WID) & Gender and Development (GAD)</i>	16
-----	--	----

DAFTAR GAMBAR

2.1	Logical Framework	29
4.1	Peta Desa Ragawacana	38
4.2	Kantor Kepala Desa Ragawacana	39
4.4	Tim Pengabdian bersama Kepala Desa Ragawacana	42
4.5	STOK Desa Ragawacana	42
4.6	Koperasi Desa Ragawacana	44
4.7	Struktur Organisasi	46
4.8	Jadwal Kegiatan Program Pengabdian	47
4.9	Pemateri Pelatihan Koperasi	48
4.10	Peserta Seminar Kewirausahaan	50
4.11	Pemateri Pelatihan Akuntansi Koperasi	51
4.12	Suasana Pelatihan Marketing	53
4.13	Pemateri Pelatihan Manajemen Desa	54
4.14	Suasana Pelatihan Teknologi Tepat Guna	56
4.16	Kegiatan Pendampingan Koperasi	62
4.17	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	62
4.18	Pendampingan Pembuatan Produk Makanan	63
4.19	Produk-produk Usaha KOPWAn	63
4.20	Produk Usaha Daur Ulang Sampah	63
4.21	Salah satu Jenis Produk Kreatif	64
4.22	Jenis Produk Kreatif	64
4.23	Suasana Pendampingan Koperasi	64
4.24	Kegiatan Pendampingan Peternakan Lele	65
4.25	Lokasi Peternakan Lele	